



**Kabupaten Barito Timur**

**DOKUMEN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH (LPPD) TAHUN 2024  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**





# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

## INSPEKTORAT

Jln. A. Yani Km. 09 Longkang, Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah 73611

email : [bartim.inspektorat@gmail.com](mailto:bartim.inspektorat@gmail.com)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Ini.

Tamiang Layang, 26 Maret 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN BARITO TIMUR

JOSMAR LAMBOK BANJARNAHOR, MT., M.Ak., CFrA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19711019 200604 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good local governance). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Bupati / walikota menyampaikan LPPD Kabupaten /Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Pusat memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD adalah sebuah langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta melihat progres pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan di pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintah Daerah.

LPPD Kabupaten/Kota diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan LPPD ini memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Laporan LPPD ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama kebijakan otonomi daerah.

Semoga LPPD ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan bahan perumusan kebijakan lebih lanjut, serta perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Tamiang Layang, 26 Maret 2025

Bupati Barito Timur



## **DAFTAR ISI**

**Hal**

### **HALAMAN JUDUL**

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** .....iii

**DAFTAR TABEL**.....vii

**BAB I. PENDAHULUAN**..... **I-1**

1.1 **Latar Belakang**..... **I-1**

1.1.1 **Penjelasan Umum**..... **I-1**

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....I-1

b. Data Geografis Wilayah .....I-2

c. Informasi Umum Data kependudukan .....I-3

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....I-4

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat  
Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan  
Perangkat Daerah .....I-5

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan  
Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan  
Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi  
Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada  
Di setiap perangkat daerah.....I-8

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..I-11

h. Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan  
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi  
Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan  
Pemerintahan yang memuat Alokasi anggaran dan  
Realisasi belanja.....I-16

1.1.2 **Perencanaan Pembangunan Daerah** ..... **I-29**

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah .....I-29

b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....I-38

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen  
Perencanaan jangka menengah .....I-44



d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen perencanaan tahunan.....	I-55
<b>1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....</b>	<b>I-107</b>
a. Latar Belakang Penerapan SPM .....	I-107
b. Dasar Hukum Penerapan SPM .....	I-108
c. Kebijakan Umum Daerah.....	I-109
<b>BAB II   CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN</b>	
<b>PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
<b>2.1 Capaian Kinerja Makro .....</b>	<b>II-1</b>
<b>2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan</b>	
<b>Pemerintahan .....</b>	<b>II-2</b>
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) .....	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan.....	II-32
<b>2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....</b>	<b>II-38</b>
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	II-41
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	II-42
c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya .....	II-44
d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	II-82
e. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya dikaitkan Hasil Kinerja yang telah dicapai .....	II-87
f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	II-91
<b>BAB III   CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS</b>	
<b>PEMBANTUAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten .....	III-1
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten .....	III-1

3.3 Permasalahan dan Kendala .....	III-1
3.4 Saran dan Tindak Lanjut .....	III-1

## **BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN**

<b>MINIMAL .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Urusan Pendidikan .....	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	IV-1
4.1.3 Realisasi .....	IV-6
4.1.4 Alokasi Anggaran .....	IV-12
4.1.5 Dukungan Personil .....	IV-12
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-13
4.2 Urusan Kesehatan.....	IV-14
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-14
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	IV-14
4.2.3 Realisasi .....	IV-27
4.2.4 Alokasi Anggaran .....	IV-41
4.2.5 Dukungan Personil .....	IV-41
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-41
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-42
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-42
4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	IV-42
4.3.3 Realisasi .....	IV-45
4.3.4 Alokasi Anggaran .....	IV-48
4.3.5 Dukungan Personil .....	IV-48
4.3.6 Permasalahan dan Solusi .....	IV-49
4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....	IV-50
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-50
4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	IV-50
4.4.3 Realisasi .....	IV-52
4.4.4 Alokasi Anggaran .....	IV-53
4.4.5 Dukungan Personil .....	IV-53
4.4.6 Permasalahan dan Solusi .....	IV-54
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	IV-55
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-55
4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	IV-55
4.5.3 Realisasi .....	IV-60
4.5.4 Alokasi Anggaran .....	IV-66

4.5.5	Dukungan Personil .....	IV-66
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-67
4.6	Urusan Sosial .....	IV-68
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-68
4.6.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	IV-68
4.6.3	Realisasi.....	IV-73
4.6.4	Alokasi Anggaran .....	IV-78
4.6.5	Dukungan Personil .....	IV-78
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-78
4.7	Program dan Kegiatan .....	IV-79
4.7.1	Urusan Pendidikan .....	IV-79
4.7.2	Urusan Kesehatan.....	IV-79
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-80
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat .....	IV-80
4.7.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	IV-81
4.7.6	Urusan Sosial.....	IV-82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>



## **DAFTAR TABEL**

	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.....	I-3
Tabel 1.1		
Tabel 1.2	Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.....	I-5
Tabel 1.3	Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	I-6
Tabel 1.4	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah	I-9
Tabel 1.5	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.....	I-12
Tabel 1.6	Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	I-16
Tabel 1.7	Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah .....	I-45
Tabel 1.8	Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.....	I-55
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro .....	II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	II-3
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-33
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.....	II-41
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.....	II-42
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten	II-44

	Barito Timur Tahun 2024 .....	
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 .....	II-45
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Target RPD.....	II-83
Tabel 2.9	Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	II-91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salahsatu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. LPPD Kabupaten disampaikan oleh Bupati Barito Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Wilayah Kabupaten Barito Timur terletak di bagian paling timur Provinsi Kalimantan Tengah dan

berada pada posisi geografis terletak antara 1° 2' Lintang Utara – 2° 5' Lintang Selatan, 144° – 115° Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Barito Timur memiliki luas awal 3.834 km<sup>2</sup> berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, namun Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur mengalami perubahan menjadi 3.213 km<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Daerah antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Daerah antara Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Daerah antara Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Barito Timur memiliki Luas Wilayah 3.213 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kecamatan, 100 desa dan 3 kelurahan.

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak antara 1° 2' Lintang Utara dan 2° 5' Lintang selatan, 114° – 115° Bujur Timur dan merupakan gerbang masuk IKN di wilayah Kalimantan Tengah, memiliki batas-batas secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan kondisi fisik wilayah (fisiografi) Kabupaten Barito Timur, pada bagian utara dan timur Sebagian besar wilayah daratan dengan Tingkat ketinggian antara 0 – 50 meter diatas permukaan laut (dpl) dan Tingkat kemiringan antara 0 – 8%, sedangkan pada bagian barat dan selatan terdiri atas daerah rawa. Berdasarkan fisiografi wilayah dapat digolongkan 4 (empat) bagian utama sebagai berikut :

- Hutan belantara : 146.765 Ha (38,28%)
- Rawa-rawa : 122.001 Ha (31,82%)
- Sungai/Danau/Genangan air : 10.467 Ha (2,73%)
- Tanah lainnya : 104.400 Ha (27,17%)

Secara topologi, wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50 – 100 m diatas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Pada umumnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0–2%, 2-15% dan 15-40%. Wilayah dengan kemiringan 0-2% lebih banyak dijumpai disisi barat, sedangkan wilayah dengan 2-15% dan 15 -40% masing-masing dapat dijumpai disisi tengah yang membentang dari utara hingga selatan. Sementara itu, untuk wilayah dengan kemiringan diatas 40% dapat dijumpai dibagian sisi utara sebelah timur.

### **c. Informasi Umum Data Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Barito Timur berdasarkan registrasi Tahun 2024 berjumlah 118.665 jiwa yang penyebarannya berdasarkan wilayah Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk dan Ratio Jenis Kelamin Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Barito Timur**  
**Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Benua Lima	3416	3212	6628	106,35
2	Dusun Timur	15012	14576	29588	102,99
3	Awang	3276	3142	6418	104,26
4	Patangkep Tutui	3749	3526	7275	106,32
5	Dusun Tengah	12847	12369	25216	103,86
6	Pematang Karau	6876	6429	13305	106,95
7	Raren Batuah	4556	4304	8860	105,85
8	Paku	4764	4416	9180	107,88
9	Paju Epat	3502	3253	6755	107,65
10	Karusen Janang	2806	2634	5440	106,52
Jumlah		<b>60804</b>	<b>57861</b>	<b>118665</b>	<b>105,08</b>

*Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024*

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang terbanyak jumlahnya adalah di Kecamatan Dusun Timur, hal ini disebabkan Kecamatan Dusun Timur merupakan pusat perkantoran di Kabupaten Barito Timur, sehingga banyak yang berdomisili, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Karusen Janang disebabkan sebagian besar masih penduduk lokal dengan kategori masih kawasan perdesaan. Sex Ratio di 10 Kecamatan tersebut relatif merata, dengan rata-rata Kabupaten sebesar 105,08.

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Kabupaten Barito Timur memiliki beberapa Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kecamatan, Desa / Kelurahan**

No.	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Benua Lima	6	1	7
2	Dusun Timur	16	1	17
3	Awang	11	-	11
4	Patangkep Tutui	10	-	10
5	Dusun Tengah	7	1	8
6	Pematang Karau	13	-	13
7	Raren Batuah	9	-	9
8	Paku	12	-	12
9	Paju Epat	9	-	9
10	Karusen Janang	7	-	7
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>3</b>	<b>103</b>

Dari Tabel 1.2 diatas Kabupaten Barito Timur memiliki 10 Kecamatan, 100 Desa dan 3 Kelurahan.

**e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah sebanyak 40 OPD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.1.3



**Tabel 1.3**  
**Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat**  
**Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat**

<b>No.</b>	<b>Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dasar Hukum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Sekretariat Daerah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
3	Inspektorat	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
6	Badan Pendapatan Daerah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
8	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
11	Dinas Kesehatan	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
12	Rumah Sakit Umum Daerah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
16	Dinas Lingkungan Hidup	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dasar Hukum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
21	Dinas Pendidikan	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
22	Dinas Perhubungan	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
27	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
28	Kecamatan awang	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
29	Kecamatan Benua Lima	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
30	Kecamatan Dusun Tengah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
31	Kecamatan Dusun Timur	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
32	Kecamatan Karusen janang	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
33	Kecamatan Paju Epat	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
34	Kecamatan Paku	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
35	Kecamatan Patangkep Tutui	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
36	Kecamatan Pematang Karau	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
37	Kecamatan Raren batuah	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
38	Kelurahan Ampah Kota	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
39	Kelurahan Tamiang Layang	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020
40	Kelurahan Taniran	Perda Kab.Bartim Nomor 3 Tahun 2020

**f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah**

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.1.4

**Tabel 1.4**  
**Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah.**

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	Urusan Pemerintahan	20	25	86	131
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Urusan Pemerintahan	5	2	24	31
3	Inspektorat	Fungsi Penunjang	6	24	13	43
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Fungsi Penunjang	6	4	14	24
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan	7	3	17	27
6	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang	10	1	11	22
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang	12	2	23	37
8	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Fungsi Penunjang	9	8	21	38
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan	7	6	22	35
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	6	3	17	26
11	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan	27	371	43	441
12	Rumah Sakit Umum Daerah	Urusan Pemerintahan	12	99	15	126
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan	11	75	49	135
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Urusan Pemerintahan	7	2	11	20
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Urusan Pemerintahan	10	9	31	50
16	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan	8	10	18	36
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan	9	9	43	61
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	Urusan Pemerintahan	6	4	18	28

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan	6	9	18	33
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan	7	6	8	21
21	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan	21	1331	66	1418
22	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan	12	3	22	37
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Urusan Pemerintahan	15	7	27	49
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan	5	4	8	17
25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan	7	4	17	28
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran	Urusan Pemerintahan	15		23	38
27	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Pemerintahan	9	1	30	40
28	Kecamatan awang	Unsur Kewilayahan	9		16	25
29	Kecamatan Benua Lima	Unsur Kewilayahan	9		10	19
30	Kecamatan Dusun Tengah	Unsur Kewilayahan	8		15	23
31	Kecamatan Dusun Timur	Unsur Kewilayahan	9		9	18
32	Kecamatan Karusen janang	Unsur Kewilayahan	9		14	23
33	Kecamatan Paju Epat	Unsur Kewilayahan	8		6	14
34	Kecamatan Paku	Unsur Kewilayahan	9		8	17
35	Kecamatan Patangkep Tutui	Unsur Kewilayahan	8		10	18
36	Kecamatan Pematang Karau	Unsur Kewilayahan	6		14	20
37	Kecamatan Raren batuah	Unsur Kewilayahan	9		9	18
38	Kelurahan Ampah Kota	Unsur Kewilayahan	5		5	10
39	Kelurahan Tamiang Layang	Unsur Kewilayahan	5		5	10
40	Kelurahan Taniran	Unsur Kewilayahan	4		2	6
	Total		373	2022	818	3213

**g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 berjumlah Rp. 1.147.129.218.345,02,- atau 96,55% sedangkan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 berjumlah Rp. 1.181.785.125.539,45-, atau 89,70% sehingga mendapatkan Surplus/defisit berjumlah Rp. 34.655.907.194,43,-. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.5

**Tabel 1.5**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024**

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.188.134.362.900</b>	<b>1.147.129.218.345,02</b>	<b>96,55</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>90.444.536.153</b>	<b>44.033.318.808,02</b>	<b>48,69</b>
	Pajak Daerah	30.593.000.000	6.722.992.512,70	21,98
	Restribusi Daerah	5.097.624.840	3.222.018.752	63,21
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.521.333.680	4.331.663.603	78,45
	Lain-lain PAD Yang sah	49.232.577.633	29.756.643.940,32	60,44
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.088.279.923.289</b>	<b>1.102.805.758.887</b>	<b>101,33</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.025.406.014.248	1.056.930.939.705	103,07
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.873.909.041	45.874.819.182	72,96
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>9.409.903.458</b>	<b>290.140.650</b>	<b>3,08</b>
	Pendapatan Hibah	5.209.903.458	0	0
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000.000	140.650	6,91



No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.317.413.770.394</b>	<b>1.181.785.135.539,45</b>	<b>89,70</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>928.775.734.994,01</b>	<b>814.615.535.789,45</b>	<b>87,71</b>
	Belanja Pegawai	448.653.455.086,01	418.364.349.457	93,25
	Belanja Barang dan Jasa	408.917.705.733	337.861.023.673,89	82,62
	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	100
	Belanja Hibah	66.423.374.175	56.601.772.658,56	85,21
	Belanja Bantuan Sosial	4.181.200.000	1.188.390.000	28,42
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>217.448.641.827,99</b>	<b>200.195.979.174</b>	<b>92,07</b>
	Belanja Modal tanah	1.000.000.000	928.648.700	92,86
	Belanja Modal Peralatan dan mesin	37.678.840.742	30.921.632.752	82,07
	Belanja Modal bangunan dan gedung	47.381.133.338,99	47.774.290.665,17	100,83
	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	131.318.167.747	120.501.107.056,83	91,76
	Belanja Aset tetap lainnya	70.500.000	70.300.000	99,72
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.540.565.754</b>	<b>1.404.472.148</b>	<b>30,93</b>
	Belanja tak Terduga	4.540.565.754	1.404.472.148	30,93
	<b>TRANSFER</b>	<b>166.648.827.818</b>	<b>165.569.138.428</b>	<b>99,35</b>
	Bagi bagi hasil	5.074.986.644	5.074.986.644	100
	Belanja bantuan keuangan	161.573.841.174	160.494.151.784	99,33
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(129.279.407.494)</b>	<b>(34.655.907.194,43)</b>	<b>26,81</b>

No.		Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1		2	3	4	
		<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>129.279.407.494</b>	<b>129.279.493,79</b>	<b>100</b>
		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>154.279.407.494</b>	<b>154.279.407.493,79</b>	<b>100</b>
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.279.407.494	154.279.407.493,79	100
		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100</b>
		Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	100
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>129.279.407.494</b>	<b>129.279.493,79</b>	<b>100</b>
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>94.623.500.299,36</b>	<b>0</b>

*Sumber BPKAD Kab.Bartim Tahun 2024 (data sementara)*

**h. Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.6

**Tabel 1.6**

**Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan,  
Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

<b>No.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Alokasi Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	227.211.885.487	15.300.166.437
		Program Pengelolaan Pendidikan	42.113.010.415	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	63.396.100	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	12.629.900	
			<b>269.400.921.902</b>	<b>15.300.166.437</b>
2	Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81.595.284.220	5.930.992.537
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.438.529.683	9.973.076.137
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	577.565.005	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	445.200.050	8.140.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	474.026.710	
	BLUD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.537.608.567	
			<b>174.068.214.235</b>	<b>15.912.208.674</b>
3	Pekerjaan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.117.134.889	703.518.247

		Kabupaten/Kota		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.856.000.000	250.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.828.592.202	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.539.800.289	
		Program Penataan Bangunan Gedung	204.545.800	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	42.421.734.073	
		Program Penyelenggaraan Jalan	122.878.849.124	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	367.817.320	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.247.032.250	
			<b>197.461.505.947</b>	<b>953.518.247</b>
4	Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan	65.821.480	
		Program Kawasan Permukiman	722.168.900	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.290.725.573	
			<b>4.078.715.953</b>	
5	Trantibumlinmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.086.664.559	615.606.916
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.282.752.835	623.152.000
			<b>9.369.417.394</b>	<b>1.238.758.916</b>
	BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.619.669.262	533.452.373
		Program Penanggulangan Bencana	377.081.230	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	560.716.816	
			<b>8.557.467.308</b>	<b>533.452.373</b>

6	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	122.639.825	
		Program Rehabilitasi Sosial	191.406.800	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	181.363.980	
		Program Penanganan Bencana	63.917.750	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	5.148.900	
			<b>564.477.255</b>	
7	Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.539.800.486	349.107.814
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	59.288.600	820.000
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	159.327.490	14.724.500
		Program Penempatan Tenaga Kerja	61.042.400	6.698.400
		Program Hubungan Industrial	159.218.520	2.803.700
			<b>4.978.677.496</b>	<b>374.154.414</b>
8	PPPA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.863.547.973	346.131.035
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	186.809.500	
		Program Perlindungan Perempuan	121.000.425	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	192.192.475	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	20.995.000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	35.000.000	
			<b>5.419.545.373</b>	<b>346.131.035</b>
9	Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	50.000.000	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	996.658.130	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	409.184.180	

		Program Pengawasan Keamanan Pangan	54.931.950	
			<b>1.510.774.260</b>	
11	Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.136.379.125	582.724.842
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	293.366.900	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	237.765.500	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	325.159.535	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35.368.800	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	43.173.900	
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	22.081.700	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.115.600	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	38.162.550	
		Program Pengelolaan Persampahan	1.830.918.700	22.633.100
			<b>11.982.492.310</b>	<b>605.357.942</b>
12	Adminstrasi Capil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.101.217.992	289.029.799
		Program Pendaftaran Penduduk	95.916.000	
		Program Pencatatan Sipil	133.092.000	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.720.000	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6.153.900	
			<b>5.412.099.892</b>	<b>289.029.799</b>
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.142.327.887	273.240.632



		Kabupaten/Kota		
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	33.158.000	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	316.794.965	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	608.446.180	5.050.000
			<b>5.100.727.032</b>	<b>278.290.632</b>
14	PPKB	Program Pengendalian Penduduk	228.048.999	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.744.994.050	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.102.097.340	
			<b>4.075.140.389</b>	
15	Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.729.006.382	401.016.813
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	292.070.900	
		Program Pengelolaan Pelayaran	42.000.000	
			<b>6.063.077.282</b>	<b>401.016.813</b>
16	Kominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.661.260.040	244.441.909
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.897.083.500	2.800.000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	288.826.000	11.300.000
			<b>5.847.169.540</b>	<b>258.541.909</b>
17	Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.721.054.761	532.480.254
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	82.367.450	
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	12.670.300	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	34.999.900	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	118.529.390	

		Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)		
		Program Pengembangan Umkm	64.470.060	
			<b>7.034.091.861</b>	<b>532.480.254</b>
18	Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.843.812.280	260.989.493
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	19.999.700	
		Program Promosi Penanaman Modal	9.999.800	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	940.804.813	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	587.672.257	3.236.139
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	129.999.400	
			<b>5.532.288.250</b>	<b>264.225.632</b>
19	Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	308.495.505	98.917.050
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.146.219.010	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	175.000.000	
			<b>1.629.714.515</b>	<b>98.917.050</b>
20	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	79.401.035	4.600.000
			<b>79.401.035</b>	<b>4.600.000</b>
21	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	175.352.200	5.300.000
			<b>175.352.200</b>	<b>5.300.000</b>
22	Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.647.356.573	417.289.708
		Program Pengembangan Kebudayaan	142.282.000	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	675.002.740	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	20.022.000	
		Program Pengelolaan Permuseuman	29.983.300	
			<b>7.514.646.613</b>	<b>417.289.708</b>

23	Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.858.146.818	262.732.357
		Program Pembinaan Perpustakaan	888.777.270	99.187.134
			<b>4.746.924.088</b>	<b>361.919.491</b>
24	Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	142.802.100	8.970.000
		Program Pengelolaan Arsip	154.008.270	8.660.400
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	63.523.240	
			<b>360.333.610</b>	<b>17.630.400</b>
25	Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.528.073.858	538.208.676
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.114.645.850	202.915.200
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.754.025.992	162.160.000
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	120.837.350	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	234.049.485	14.328.700
			<b>10.751.632.535</b>	<b>917.612.576</b>
26	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	461.743.580	
		Program Pemasaran Pariwisata	351.445.110	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	89.863.200	
			<b>903.051.890</b>	
27	Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.758.498.420	17.348.190
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.331.761.490	10.360.000
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	388.879.655	5.023.425
			<b>5.479.139.565</b>	<b>32.731.615</b>
28	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.153.837.965	1.645.328.340

		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.355.961.945	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.493.234.210	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	337.607.225	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	179.691.830	
		Program Penyuluhan Pertanian	1.175.000.650	
			<b>47.695.333.825</b>	<b>1.645.328.340</b>
29	Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	306.199.400	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	259.999.500	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	29.999.900	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	149.999.880	
			<b>756.198.680</b>	
30	Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	77.082.640	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	42.436.200	
			<b>119.518.840</b>	
31	Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	17.451.700	
			<b>17.451.700</b>	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
32	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.584.160.591	1.775.945.285
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	37.810.838.519	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	6.108.358.377	
			<b>122.503.357.487</b>	<b>1.775.945.285</b>

33	SEKRETARIAT DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.842.362.426	2.761.713.960
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	20.854.238.292	988.722.303
			<b>51.696.600.718</b>	<b>3.750.436.263</b>
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
34	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.726.230.264	391.826.273
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.275.244.380	7.336.000
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	626.580.550	
			<b>7.628.055.194</b>	<b>399.162.273</b>
35	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.805.580.975	264.738.896
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	479.756.400	
			<b>9.434.634.060</b>	<b>264.738.896</b>
36	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.051.693.377	2.014.299.971
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	32.333.199.516	213.920.179
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.277.126.500	119.932.048
			<b>68.662.019.393</b>	<b>2.348.152.198</b>
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.092.816.646	371.087.212
		Program Kepegawaian Daerah	5.479.962.250	28.108.674
			<b>10.572.778.896</b>	<b>399.195.886</b>
38	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	116.011.600	
			<b>116.011.600</b>	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			

39	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.398.448.611	466.610.164
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.801.349.220	10.050.000
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	405.601.560	
			<b>9.605.399.391</b>	<b>476.660.164</b>
	Unsur Kewilayahan			
40	Kecamatan Dusun Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.678.890.134	307.972.613
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.430.800	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	627.069.885	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.973.405	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.375.000	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	106.999.925	
			<b>5.459.739.149</b>	<b>307.972.613</b>
41	Kecamatan Pematang Karau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.087.073.311	198.687.056
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.704.650	
			<b>3.171.777.961</b>	<b>198.687.056</b>
42	Kecamatan Awang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.901.429.685	207.454.133
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	87.949.450	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.500.000	
			<b>2.999.879.135</b>	<b>207.454.133</b>
43	Kecamatan Patangkep Tutui	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.524.177.995	190.073.253

		Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.000.000	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.800.000	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.750.000	
			<b>2.610.727.995</b>	<b>190.073.253</b>
44	Kecamatan Dusun Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.485.161.198	254.403.114
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	62.680.200	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	300.049.000	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.400.000	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.000.000	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.450.000	
			<b>3.883.740.398</b>	<b>254.403.114</b>
45	Kecamatan Benua Lima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.097.669.849	254.353.726
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	53.910.200	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	399.655.515	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.608.800	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.550.000	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.561.200	



			<b>3.564.955.564</b>	<b>254.353.726</b>
46	Kecamatan Paku	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.526.287.258	173.365.733
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	99.881.585	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.999.920	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.995.575	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.998.705	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000	
			<b>2.661.283.043</b>	<b>173.365.733</b>
47	Kecamatan Paju Epat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.331.604.282	234.347.885
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	43.510.000	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.010.000	10.010.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.475.000	
			<b>2.392.599.282</b>	<b>244.357.885</b>
48	Kecamatan Raren Batuah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.796.516.416	198.234.464
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	91.705.340	10.250.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	126.340.400	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.000	8.000.000
			<b>3.022.562.156</b>	<b>216.484.464</b>
49	Kecamatan Karusen Janang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.886.583.019	215.419.322

		Kabupaten/Kota		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.920.200	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	54.401.800	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.900.000	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.500.000	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.500.000	
			<b>2.975.805.019</b>	<b>215.419.322</b>
	Unsur Pemerintahan Umum			
50	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.205.753.640	353.747.300
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	928.080.885	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	17.015.466.100	4.111.400
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.434.205	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	84.999.495	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	425.398.335	1.575.000
			<b>22.688.132.660</b>	<b>359.433.700</b>

### **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa diharapkan di masa mendatang dengan kondisi saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan harus dilihat dari aspek makro serta aspek yang muncul dan terbatas pada internal Kabupaten Barito Timur walaupun secara langsung dan tidak langsung, permasalahan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karena setiap daerah merupakan wilayah yang terbuka dan sangat bergantung dengan wilayah yang lebih luas dan menjadi induknya.

Pembahasan permasalahan pembangunan dalam dokumen ini dimulai dari permasalahan makro yang berkaitan dengan kondisi nasional, regional serta sektoral yang secara langsung saling berkaitan dan dilanjutkan dengan permasalahan menurut urusan pemerintahan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Selain itu, permasalahan pembangunan bisa dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan periode lalu untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Pembangunan daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kehidupan antar individu semakin terasa. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "rasio gini," dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Indeks Gini yang menyatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang, maka dapat disimpulkan masih terdapat pendapatan penduduk yang tidak merata. Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah “Belum meratanya kesejahteraan masyarakat Barito Timur”.

Fokus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

1. Fokus Permasalahan Perekonomian Daerah: Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat

Perekonomian memegang peran yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal dan belum meratanya pendapatan masyarakat.

Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya merupakan sektor yang diunggulkan sebagai sektor yang berkontribusi lebih dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam perkembangannya, sektor pertanian dan turunannya sedang dalam tahap menjadi sektor yang paling diunggulkan dibandingkan dengan pertambangan. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan secara langsung sudah merusak ekosistem yang ada di Barito Timur.

Sektor pertanian dan turunannya yang menjadi unggulan ini belum berkembang secara maksimal. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor ekonomi kerakyatan. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian

adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang mumpuni, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

## 2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar: Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan

Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan untuk jaminan sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana

komunikasi, dan sarana perhubungan. Namun realitanya, pembangunan infrastruktur dasar ini tidak dirasakan pada masyarakat di daerah terpencil. Dari fokus permasalahan infrastruktur dasar terdapat permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih belum merata.

Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai yang ditunjukkan dengan jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Untuk mendukung transportasi darat, Panjang Jalan di Kabupaten Barito Timur sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 978,19 km. Dengan 75,30 km adalah kewenangan provinsi, dan 813,19 km merupakan kewenangan kabupaten. Sesuai dengan jenis permukaan jalan kewenangan kabupaten maka dibagi sebagai berikut: 290,54 km merupakan jalan aspal; 215,33 km jalan dengan permukaan kerikil; dan 307,32 km jalan dengan permukaan tanah.

Pembangunan infrastruktur dasar terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terkadang terkendala oleh masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini harus mampu diawasi dan dikendalikan penuh oleh pemerintah, agar pembangunan tetap berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata.

### 3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia: Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Barito Timur

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di berbagai sektor pembangunan daerah. Dari fokus permasalahan Sumber Daya Manusia terdapat permasalahan pokok yaitu Sumber Daya Manusia Barito Timur belum berdaya saing secara optimal.

Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (attitude) yang baik. Sehingga tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik namun juga mampu mengembangkan budaya yang mampu memberikan terobosan- terobosan yang inovatif dan kreatif.

IPM Kabupaten Barito Timur berada di urutan ke 3 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yaitu sebesar 71,47 pada tahun 2021. IPM Kabupaten Barito Timur diatas angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 71,25 pada tahun 2021. Angka IPM tertinggi diperoleh Kota Palangkaraya sebesar 80,82 sedangkan IPM dengan nilai terkecil se Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Seruyan dengan nilai IPM sebesar 67,67.

Dengan melihat posisi dan kondisi kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik,

namun bukan berarti hal ini tidak menjadi suatu permasalahan. Hal ini harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan inovasi yang akan meningkatkan kualitas daya saing manusia yang mampu bersaing.

4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya: Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah

Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi harus dipelajari dan dimengerti agar tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dari fokus permasalahan keragaman budaya terdapat permasalahan pokok, yaitu belum terwujudnya manusia Barito Timur yang beragama dan berbudaya

Budaya merupakan nilai leluhur yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Dua hal ini berbeda dan butuh pendewasaan diri untuk meyatukan keduanya. Perbedaan pada bidang lainnya apabila tidak disikapi dengan bijaksana juga akan menyebabkan perpecahan yang mengganggu ketentraman dan keamanan.

Ketentraman dan keamanan merupakan salah satu aspek yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat. Dengan ketentraman dan keamanan maka hidup masyarakat akan lebih tenang dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Dalam bidang ini, pembangunan di Kabupaten Barito Timur masih mempunyai kendala itu masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang politik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat bergerak cepat mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini. Pentingnya kenyamanan kota akan mempengaruhi investasi, perekonomian masyarakat, dan dinamika sosial dalam masyarakat.



5. Fokus Permasalahan Birokrasi: Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat timbulnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, dan akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Dari fokus permasalahan birokrasi terdapat permasalahan pokok yaitu masih rendahnya kinerja pemerintah daerah.

Evaluasi kinerja menunjukkan hasil kemajuan pemerintah daerah dalam mengemban tugasnya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

Salah satu pengukuran keberhasilan birokrasi adalah maturitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas system pengendalian intern organisasi tersebut. Level maturitas SPIP Kabupaten Barito Timur

mencapai angka 3,002 atau berada di level 3. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Berdasarkan Surat KemenPAN-RB No B/412/AA.05/2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 tanggal 7 Maret 2022. Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur tahun 2021 memperoleh nilai 50,77 atau predikat CC, seperti pada tahun 2020.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Barito Timur memberikan informasi yang terbebas dari salah saji material. Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antar pihak, dapat menciptakan efektifitas implementasi strategi yang dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur.

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran

pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut, dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

#### **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi pembangunan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 - 2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN BARITO TIMUR YANG MAJU, MANDIRI DAN PROFESIONAL YANG BERIMAN DAN BERTAQWA”**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi. Dengan pernyataan Misi diharapkan semua komponen stakeholders dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran masing-masing pihak dalam pembangunan. Rumusan Misi hendaknya mampu; (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam Visi; (b) memberi petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani melalui program-program pembangunan; (d) memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom baru, disebutkan bahwa : “Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota tahun 2024 – 2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi / Kabupaten/ Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota tahap keempat, dan/atau isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut diatas, maka periode tahun 2024 – 2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 – 2028 yang memiliki visi untuk mewujudkan Barito Timur yang Maju, Mandiri dan Profesional yang beriman dan bertaqwa. Oleh sebab itu, rumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur tahun 2024 – 2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur 2008 – 2028, dipadukan dengan Misi RPJPD Kabupaten Barito Timur 2008 – 2028, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 5 (lima) Tujuan Pembangunan dan sebanyak 16 (enam belas) sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2024 -2026, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Tujuan pertama adalah “Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu :
  - 1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggul daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Pertanian.
    - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Industri Pengolahan.
  - 1.2. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Jumlah kunjungan wisata.
    - PAD sektor pariwisata.
  - 1.3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Pertumbuhan Ekonomi
    - Gini Rasio
    - Angka Kemiskinan
    - Indeks Desa Membangun (IDM)

- 1.4. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator
  - Nilai investasi berskala nasional (PMDN)
  - Nilai investasi berskala nasional (PMA)
  - Tingkat pengangguran terbuka.
- 2) Tujuan Kedua adalah “Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:
  - 2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Rata-rata lama sekolah.
    - Harapan lama sekolah.
  - 2.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Angka harapan hidup.
  - 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pendapatan, kesehatan serta pendidikan penduduk. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
    - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 3) Tujuan Ketiga adalah “Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
  - 3.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Persentase RT yang terakses air bersih.
    - Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%).
    - Rasio elektrifikasi (rumah tangga penggunaan listrik) (%).
  - 3.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
    - Indeks Kualitas Air (IKA).
    - Indeks Kualitas Udara (IKU).

- Indeks kualitas Lahan (IKL)
- 4) Tujuan Keempat adalah “Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga”, terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :
- 4.1 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana).
- 4.2 Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi.
  - Tingkat Penguatan terhadap organisasi kepemudaan.
- 4.3 Meningkatkan prestasi olahraga. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi (perolehan medali)
- 4.4 Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Jumlah objek wisata daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan daerah.
  - Jumlah benda, situs dan cagar budaya daerah yang dipelihara.
- 5) Tujuan Kelima adalah “Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab”, terdiri dari 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu:
- 5.1 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah.
- 5.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Indeks Reformasi Birokrasi.
- 5.3 Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Jumlah IKM yang terbina.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :

**“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.**

Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Sumberdaya-sumberdaya lokal yang dimiliki sangat perlu dikembangkan dan dioptimalisasikan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok



yaitu perekonomian berbasis kerakyatan yang harus terus dikembangkan secara optimal, demikian juga terus dioptimalkannya pemerataan pendapatan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadikan kendala sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal, perlu dikembangkan ke arah industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya belinya, maka daerah dapat mengoptimalkan sumber daya lokalnya dengan:

- Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif
- Mewujudkan penataan lokasi sector informal
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal

- Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang memiliki pengetahuan entrepreneur.
- Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan yang unggul melalui penguatan kelembagaan koperasi.
- Peningkatan produksi hasil pertanian strategis
- Jaringan infrastruktur khususnya akses jalan antar desa, kecamatan dan perkotaan yang memadai dan pemerataan jaringan listrik dan penerangan jalan.

**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah**

Program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam masing-masing program setiap perangkat daerah. Pelaksanaan program-program masing-masing Perangkat Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pada bagian ini disajikan semua program-program masing-masing perangkat daerah disertai dengan pendanaan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program perangkat daerah dibuat untuk masa periode pelaksanaan RPD bagi masing-masing perangkat daerah. Untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai, maka program perangkat daerah dilengkapi dengan target indikator kinerja.

Program perangkat daerah Kabupaten Barito Timur merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

**Tabel 1.7**  
**Program Pembangunan Daerah berdasarkan**  
**dokumen perencanaan jangka menengah Tahun 2024**

No	Program	Jumlah (Rp)	OPD
1	Program Pengelolaan Pendidikan	39.405.981.602,61	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.781.000,00	Dinas Pendidikan
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	60.000.000,00	Dinas Pendidikan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	63.633.931.239,24	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	705.537.878,63	Dinas Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	445.201.020,46	Dinas Kesehatan
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	437.888.271,50	Dinas Kesehatan
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.030.005.297,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.000.570.763,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	193.350.059,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.951.257.600,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Program Pengembangan Permukiman	11.054.120.121,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Program Penataan Bangunan Gedung	278.012.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	22.015.546.526,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Program Penyelenggaraan Jalan	145.742.245.209,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	342.850.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	939.109.272,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Program Pengembangan Perumahan	69.800.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan

			Permukiman
20	Program Kawasan Permukiman	139.467.507,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	292.132.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3.235.478.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	913.745.830,00	Satuan Polisi Pamong Praja
24	Program Penanggulangan Bencana	319.112.143,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
25	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	323.951.757,52	Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
26	Program Pemberdayaan Sosial	86.511.636,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
27	Program Rehabilitasi Sosial	888.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	34.410.982,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
29	Program Penanganan Bencana	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
31	Program Peningkatan Kerjasama Desa	15.085.435,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
32	Program Administrasi Pemerintahan Desa	235.414.397,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
33	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	463.180.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
34	Program Perencanaan Tenaga Kerja	33.062.500,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	245.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
36	Program Penempatan Tenaga Kerja	60.600.500,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
37	Program Hubungan Industrial	148.683.142,04	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian

38	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	70.540.600,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
39	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	24.798.845,96	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
40	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	105.654.700,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
41	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	34.100.662,23	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
42	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	33.121.500,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
43	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	33.610.870,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
44	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	129.561.371,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
45	Program Perlindungan Perempuan	80.307.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
46	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	173.795.691,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
47	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	24.525.635,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
48	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.195.681,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
49	Program Perlindungan Khusus Anak	29.282.129,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
50	Program Pengendalian Penduduk	120.760.490,00	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
51	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.624.663.000,00	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
52	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.500.803.440,00	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
53	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	35.098.700,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
54	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	684.787.246,12	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
55	Program Penanganan Kerawanan Pangan	110.472.395,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

56	Program Pengawasan Keamanan Pangan	130.346.739,93	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
57	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.941.211.307,53	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
58	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.888.551.971,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
59	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	230.792.134,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
60	Program Perizinan Usaha Pertanian	65.629.318,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
61	Program Penyuluhan Pertanian	1.552.699.490,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
62	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	553.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
63	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	379.216.851,00	Dinas Lingkungan Hidup
64	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	278.379.484,00	Dinas Lingkungan Hidup
65	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	44.445.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
66	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	87.780.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
67	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	42.510.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
68	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	55.679.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
69	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	21.477.391,00	Dinas Lingkungan Hidup
70	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	61.800.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
71	Program Pengelolaan Persampahan	2.537.833.201,00	Dinas Lingkungan Hidup
72	Program Pendaftaran Penduduk	95.000.000,00	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
73	Program Pencatatan Sipil	143.634.054,28	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

74	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.119.337,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
75	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.358.335,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
76	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	579.383.089,00	Dinas Perhubungan
77	Program Pengelolaan Pelayaran	53.067.996,00	Dinas Perhubungan
78	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.677.198.500,00	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
79	Program Aplikasi Informatika	102.927.412,00	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
80	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.374.912,08	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
81	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	183.938.352,11	Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
82	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	105.000.000,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
83	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	101.581.706,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
84	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75.919.087,92	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
85	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	362.121.012,36	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
86	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	271.888.540,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
87	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	124.486.538,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
88	Program Pengembangan UMKM	600.848.228,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
89	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	268.422.183,19	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
90	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.041.850.000,00	Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	293.137.816,00	Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
92	Program Pengembangan Ekspor	120.392.840,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

93	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	178.206.069,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
94	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	150.334.625,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
95	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	35.381.913,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
96	Program Promosi Penanaman Modal	20.579.382,25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
97	Program Pelayanan Penanaman Modal	72.135.703,89	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
98	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	506.918.071,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
99	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.603.590,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	352.038.795,12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
101	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.925.357.510,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
102	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	210.365.910,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.903.923.449,24	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
104	Program Pengembangan Kebudayaan	65.750.759,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
105	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	388.942.612,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
106	Program Pembinaan Sejarah	94.365.910,65	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
107	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	18.859.305,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
108	Program Pengelolaan Permuseuman	31.635.575,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
109	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	59.176.144,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
110	Program Pemasaran Pariwisata	33.705.726,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
111	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	97.000.000,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
112	Program Pembinaan Perpustakaan	258.567.590,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



113	Program Pengelolaan Arsip	27.274.148,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
114	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	39.303.950,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
115	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	290.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
116	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	410.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
117	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	352.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
118	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	185.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
119	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.119.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
120	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.776.918.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
121	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	225.520.458,18	Dinas Perikanan Dan Peternakan
122	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	23.852.000.000,00	Sekretariat Daerah
123	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.292.000.000,00	Sekretariat Daerah
124	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	11.431.000.000,00	Sekretariat DPRD
125	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	998.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
126	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	637.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
127	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	159.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
128	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	559.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
129	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	208.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
130	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.855.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
131	Program Kepegawaian Daerah	4.144.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

132	Program Penyelenggaraan Pengawasan	941.074.861,40	Inspektorat
133	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	344.339.738,40	Inspektorat
134	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
135	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	840.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
136	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
137	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
138	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
139	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	108.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
140	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	62.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
141	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	83.170.000,00	Kecamatan Pematang Karau
142	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	107.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
143	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
144	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
145	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	75.000.000,00	Kecamatan Awang
146	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	43.000.000,00	Kecamatan Awang
147	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	Kecamatan Awang
148	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000,00	Kecamatan Awang
149	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.600.000,00	Kecamatan Awang
150	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	61.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
151	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	59.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui

152	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
153	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
154	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
155	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	95.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
156	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	620.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
157	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
158	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
159	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
160	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	45.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
161	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	499.500.000,00	Kecamatan Benua Lima
162	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
163	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
164	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
165	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	135.000.000,00	Kecamatan Paku
166	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.000.000,00	Kecamatan Paku
167	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	Kecamatan Paku
168	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	Kecamatan Paku
169	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.000.000,00	Kecamatan Paku
170	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	91.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
171	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	97.000.000,00	Kecamatan Paju Epat

172	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	62.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
173	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	62.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
174	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
175	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	113.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
176	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
177	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	52.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
178	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
179	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
180	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
181	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	107.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
182	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	53.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
183	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
184	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
185	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	160.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
186	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.190.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
187	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
188	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
189	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	750.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Kegiatan pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa kegiatan prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.8.

**Tabel 1.8**  
**Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan**  
**Dokumen Perencanaan Tahun 2024**

Urusan Pendidikan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 138.444.650,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 194.644.523.669,-
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 17.000.000,-
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 344.444.175,-
	5) Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 1.435.702.651,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 21.750.935.500,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 623.617.617,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
	1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 42.032.559.090,-
	2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 10.856.486.970,-
	4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 4.047.303.210,-
		Rp. 862.810.035,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 276.860.657.177,-</b>

	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 206.809.425,-  Rp. 49.000.231.837,- Rp. 167.505.950,-  Rp. 130.063.240,- Rp. 837.309.320,- Rp. 356.354.395,-  Rp. 11.855.188.600,-  Rp. 176.279.588,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.000.000.000,-  Rp. 42.569.463.565,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	
	1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 38.477.100,-  Rp. 84.747.100,-  Rp. 347.566.155,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	
	1) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp. 65.543.700,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	
	1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 103.002.800,-  Rp. 33.464.020,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BULD)</b>	
	1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.000.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 157.771.981.106,-</b>

	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 73.682.100,- Rp. 5.958.134.309,- Rp. 41.250.000,- Rp. 794.865.830,- Rp. 2.622.300.000,- Rp. 376.271.020,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	
	1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengembangan dan Pengelolaan\ Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.718.044.900,- Rp. 11.373.507.300,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.461.781.280,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	
	1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 233.138.750,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.779.298.880,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.715.713.120,-
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	
	1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.548.976.600,-
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	
	1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 204.545.800,-
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	
	1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.111.817.480,-

<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	
	1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 101.634.683.001,-
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	
	1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp. 367.817.320,-
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	
	1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp. 1.861.288.160,-
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 130.958.380,-
	3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 89.560.260,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 180.097.634.490,-</b>



	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	
	1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 78.262.560,-
	2) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp. 198.910.000,-
2	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
	1) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp. 1.756.468.400,-
3	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	
	1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.141.950.080,-
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	
	1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp. 2.660.464.279,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.836.055.319,-</b>

	<b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (SatpolPP)</b>	
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.873.228.476,- Rp. 369.340.991,- Rp. 50.000.000,- Rp. 3.037.256.000,- Rp. 108.942.219,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 794.392.159,- Rp. 190.079.200,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 8.423.239.045,-</b>

	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD dan Damkar)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 30.896.000,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.500.000.000,-
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 11.329.600,-
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 445.228.708,-
	5) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 279.216.450,-
	6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.222.997.240,-
	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 174.730.800,-
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 832.112.393,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	
	<b>1)</b> Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 592.081.020,-
	<b>2)</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 1.219.199.680,-
	<b>3)</b> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 326.656.050,-
	<b>4)</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 566.521.875,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	
	1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.161.753.085,-
	2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 136.086.955,-
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.116.572.400,-
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 15.200.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 20.630.582.256,-</b>

	Urusan Tenaga Kerja	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 87.532.950,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.406.524.953,-
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 8.589.900,-
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 83.982.350,-
	5) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 351.536.920,-
	6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 136.399.980,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 431.736.800,-
	8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.087.709.666,-
	9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 293.469.764,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	
	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 100.621.800,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	
	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 503.785.410,-
	2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 23.994.200,-
	3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 33.416.200,-
	4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Rp. 20.984.165,-
	5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.575.000,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	
	1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 54.424.300,-
	2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 19.611.200,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	
	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 72.782.300,-
	2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 74.924.300,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 4,217,874,169,-</b>

	Urusan Perindustrian	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	
	1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 70.645.200,-
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	
	1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 24.798.600,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	
	1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 253.652.820,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 349.096.620,-</b>

	Urusan Transmigrasi	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	
	1) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 34.100.500,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	
	1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.121.500,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	
	1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp. 47.886.200,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 115.108.200,-</b>

	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 45.000.000,-  Rp. 3.457.440.000,- Rp. 26.562.500,- Rp. 321.053.600,- Rp. 1.529.156.475,- Rp. 146.598.494,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
	1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 62.974.275,-  Rp. 61.513.000,- Rp. 100.609.115,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	
	1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 85.000.000,- Rp. 65.000.225,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	
	1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.150,- Rp. 160.802.540,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	
	1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.437.200,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	
	1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 56.751.975,- Rp. 75.036.800,-
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	
	1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Rp. 36.999.700,-

	Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan\ Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi\ Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 101.618.110,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 6.417.554.159,-</b>



	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
	1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 283.082.600,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	
	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 1.356.040.750,-
	2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 65.161.000,-
	3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 303.321.320,-
	4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 1.413.841.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	
	1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.456.386.655,-
	2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 134.771.810,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.012.605.135,-</b>

	Urusan Lingkungan Hidup	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 346.761.860,-  Rp. 3.864.675.000,- Rp. 124.380.000,- Rp. 808.730.135,- Rp. 371.738.880,-  Rp. 7.465.195.800,-  Rp. 191.287.470,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp. 149.999.700,-  Rp. 403.000.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 404.266.950,-  Rp. 99.999.950,-  Rp. 296.692.700,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	
	1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp. 326.940.230,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	
	1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.000.000,- Rp. 24.999.800,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	
	1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 87.780.900,-
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	
	1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 42.509.700,-
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	

	1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.274.000,-
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	
	1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.477.300,-
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 61.800.550,-
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	
	1) Pengelolaan Sampah	Rp. 2.537.549.205,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 17.765.060.130,-</b>

	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.526.984.680,- Rp. 1.241.659.870,- Rp. 1.746.292.000,- Rp. 170.487.388,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	
	1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 237.586.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	
	1) Pelayanan Pencatatan Sipil 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 150.000.000,- Rp. 85.000.000,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
	1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp. 56.790.000,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
	1) Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 55.180.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 6.269.979.938,-</b>

	Urusan Sosial	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	
	1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 105.115.110,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	
	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 451.654.000,-
	2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 230.520.585,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	
	1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 10.000.100,-
	2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 165.120.250,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	
	1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 131.695.290,-
	2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 26.562.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.168.922.435,-</b>

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 34.949.850,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.755.690.000,-
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.019.800,-
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 65.000.000,-
	5) Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 248.702.275,-
	6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 169.999.701,-
	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 535.074.880,-
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 264.483.393,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	
	1) Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Rp. 19.808.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 258.171.025,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	
	1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 463.179.110,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 4.825.078.034,-</b>

Ururan Perhubungan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 31.660.000,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.616.645.522,-
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 26.193.150,-
	4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 3.500.000,-
	5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 57.460.000,-
	6) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 326.532.745,-
	7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.513.636.350,-
	8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.182.500.000,-
	9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 370.886.584,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
	1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 12.538.640,-
	2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 435.000.000,-
	3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 600.000.000,-
	4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 85.000.000,-
	5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 261.170.600,-
	6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 169.346.410,-
	7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 15.000.000,-
	8) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 85.009.250,-
	9) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.000.000,-
	10) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 275.000.000,-
	11) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 43.000.000,-
	12) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.400.000,-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	
	1) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp. 32.000.000,-
	2) Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.000.000,-
	3) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp. 72.000.000,-
	4) Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 23.500.000,-
	5) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 23.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 10.383.979.251,-</b>

	Urusan Komunikasi dan Informatika	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 72.473.200,-  Rp. 2.407.829.516,- Rp. 75.093.750,- Rp. 385.485.330,- Rp. 40.583.000,-  Rp. 1.077.646.000,-  Rp. 345.354.497,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	
	1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.808.010.250,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	
	1) Pengelolaan e government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 52.228.235,-  Rp. 298.595.300,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 6.563.299.078,-</b>



	Urusan Statistik	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	
	1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.373.600,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 40.373.600,-</b>

	Urusan Persandian	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	
	1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.966.815,-
	2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 83.967.475,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 183.934.290,-</b>

<b>Urusan Penanaman Modal</b>		
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 71.874.900,-  Rp. 2.008.997.674,- Rp. 200.238.850,- Rp. 473.903.210,- Rp. 440.945.400,- Rp. 91.739.760,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	
	1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 35.381.700,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	
	1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.579.350,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	
	1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 72.135.450,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	
	1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 506.917.718,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	
	1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 70.603.350,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.993.317.362,-</b>

Urusan Pemuda dan Olahraga		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	
	1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp. 174.707.380,00,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	
	1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 149.997.430,00,-
	2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 69.933.396,00,-
	3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp. 2.500.000.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	
	1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp. 439.058.320,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.333.696.526,-</b>

Urusan Kebudayaan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 37.850.000, -  Rp. 3.604.359.712,- Rp. 135.161.500,- Rp. 580.497.895,- Rp. 2.295.380.000,-  Rp. 240.289.764,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	
	1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 93.614.400,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	
	1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 711.966.860,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	
	1) Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47.895.000,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	
	1) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 63.336.600,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	
	1) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp. 105.915.600,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 7.916.267.331,-</b>

Urusan Pariwisata		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	
	1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 2.288.345.100,- Rp. 937.561.960,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	
	1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 196.497.285,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	
	1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 264.565.940,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.686.970.285,-</b>

Urusan Perpustakaan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 58.186.200,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.786.372.829,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 47.018.000,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 128.951.920,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 206.448.600,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 757.363.000,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 60.473.600,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
	1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 350.164.570,-
	2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 332.804.830,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 4.727.783.549,-</b>

Urusan Kearsipan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 146.719.900,- Rp. 12.244.500,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	
	1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 60.738.330,- Rp. 73.493.340,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	
	1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Rp. 26.902.220,- Rp. 29.187.820,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 349.286.110,-</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.458.900,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.458.900,-</b>

Urusan Kelautan dan Perikanan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 285.589.720,- Rp. 4.611.800.854,- Rp. 167.321.250,- Rp. 593.286.365,- Rp. 528.198.000,- Rp. 2.201.175.000,- Rp. 214.643.172,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	
	1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 652.171.355,- Rp. 400.256.400,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	
	1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp. 432.331.000,- Rp. 1.972.452.055,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
	1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp. 283.830.220,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	
	1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 115.474.510,- Rp. 224.127.020,- Rp. 216.229.825,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 12.898.886.74,-</b>



Pernakan Urusan Pertanian		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	
	1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 4) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp. 234.387.500,- Rp. 112.972.800,-  Rp. 1.939.181.835,-  Rp. 513.863.500,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	
	1) Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 251.716.880,- Rp. 1.370.000.000,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	
	1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 475.222.980,-  Rp. 138.733.900,-  Rp. 35.359.840,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.071.439.235,-</b>

Urusan Pangan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	
	1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 102.986.820,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	
	1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 169.275.400,-
	2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 102.734.495,-
	3) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Rp. 49.995.660,-
	4) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp. 729.882.270,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	
	1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp. 84.999.780,-
	2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 463.492.225,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	
	1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 134.999.995,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.838.366.645,-</b>

Urusan Pertanian (Pilihan)		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 159.999.670,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.056.675.450,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 163.750.000,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 452.958.925,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 319.990.150,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.313.997.600,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 272.959.956,-
	8) Penataan Organisasi	Rp. 182.976.950,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	
	1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 3.427.494.735,-
	2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 678.073.660,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	
	1) Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 6.901.537.040,-
	2) Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 10.724.988.959,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	
	1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 328.423.005,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	
	1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 208.087.330,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	
	1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.065.918.375,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 43.257.831.805,-</b>

<b>Urusan Koperasi, Usaha dan Menengah</b>		
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 102.364.800,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.340.791.186,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 127.446.000,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 519.378.545,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 186.840.510,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.144.284.000,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 197.669.760,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERAS</b>	
	1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 105.024.850,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	
	1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 94.303.110,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	
	1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 271.884.850,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	
	1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 455.415.510,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	
	1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 415.905.810,-
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	
	1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp. 262.795.110,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 9.264.103.951,-</b>

Urusan Perdagangan		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	
	1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp. 25.282.000,-
	2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp. 23.089.600,-
	3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Rp. 54.163.000,-
	4. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 81.791.675,-
	5. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Rp. 27.579.600,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	
	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.632.203.970,-
	2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 78.676.500,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	
	1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 728.065.500,-
	2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.320.400,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	
	1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 383.963.000,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
	1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp. 167.085.900,-
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	
	1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp. 490.270.180,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.722.491.325,-</b>

Sekretariat Daerah (Urusan Pemerintahan)		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 636.835.305,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.187.859.355,-
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 134.640.000,-
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 348.906.250,-
	5) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.439.396.184,-
	6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 650.000.000,-
	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.972.734.000,-
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.761.339.847,-
	9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 774.114.420,-
	10) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 2.966.232.611,-
	11) Penataan Organisasi	Rp. 606.025.850,-
	12) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 7.762.692.120,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	
	1) Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.747.042.070,-
	2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 21.388.815.871,-
	3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.399.195.240,-
	4) Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 249.660.500,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	
	1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 2.726.943.305,-
	2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 575.580.470,-
	3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.278.035.360,-
	4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 440.676.600,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 74.046.725.358,-</b>

Sekretariat DPRD		
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 169.999.730,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.922.999.665,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 985.000.000,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.240.615.000,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 900.000.000,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.113.399.200,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.315.000.000,-
	8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 14.086.101.685,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	
	1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 952.993.900,-
	2) Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 207.499.540,-
	3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 174.998.130,-
	4) Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 4.266.451.470,-
	5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 2.823.688.375,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 33.853.573.365,-</b>

<b>Bappeda litbang (Urusan Pemerintahan)</b>		
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 54.893.875,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.787.872.851,-
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 7.782.400,-
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 53.858.000,-
	5) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 236.440.240,-
	6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 96.757.015,-
	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 819.692.792,-
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 85.856.466,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
	1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 775.580.460,-
	2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 36.743.200,-
	3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 241.862.635,-
	4) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp. 218.462.780,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
	1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 263.755.140,-
	2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 85.567.900,-
	3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 372.305.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 7.294.939.554,-</b>



	Penelitian dan Pengembangan	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	
	1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 81.257.600,-
	2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 76.251.200,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 157.508.800,-</b>

	<b>Badan Pendapatan Daerah (Keuangan)</b>	
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 29.994.600,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.554.518.039,-
	3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 244.130.330,-
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 83.638.000,-
	5) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 728.656.360,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.107.300.000,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 277.324.840,-
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
	1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp. 688.539.675,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.714.101.844,-</b>

	<b>BPKAD (Keuangan)</b>	
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 108.400.000,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 35.184.131.817,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 364.303.700,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 965.845.370,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 439.154.115,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.737.045.000,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 503.949.998,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
	1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.028.617.600,-
	2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 1.083.925.300,-
	3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 1.036.374.100,-
	4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 203.444.290.500,-
	5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp. 81.836.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	
	1) Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.277.126.500,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 250.255.000.000,-</b>

	<b>BKPSDM (Kepegawaian)</b>	
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36.315.050,-  Rp. 2.450.794.262,- Rp. 115.989.300,- Rp. 540.427.075,- Rp. 69.002.310,-  Rp. 1.111.360.000,-  Rp. 311.701.163,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
	1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2) Mutasi dan Promosi ASN 3) Pengembangan Kompetensi ASN 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 634.077.250,-  Rp. 183.903.650,- Rp. 3.897.810.500,- Rp. 106.059.200,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 9.457.439.760,-</b>

	Inspektorat Daerah	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Penataan Organisasi	Rp. 186.599.650,-  Rp. 5.598.316.548,- Rp. 30.490.000,-  Rp. 396.144.500,- Rp. 562.968.990,-  Rp. 811.801.875,- Rp. 552.606.376,-  Rp. 245.936.800,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 1.840.239.040,- Rp. 598.066.600,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2) Pendampingan dan Asistensi	Rp. 219.320.860,-  Rp. 616.894.720,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 6.130.461.549,-</b>

	Kecamatan Awang (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 21.192.000,-  Rp. 2.039.567.724,- Rp. 24.281.250,- Rp. 299.883.400,- Rp. 38.336.725,-  Rp. 555.090.000,-  Rp. 82.460.250,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 109.236.800,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 52.150.000,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 3.500.000,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 8.600.200,-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.500.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.237.798.349,-</b>

	Kecamatan Benua Lima (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 52.034.880,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.050.700.469,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 43.000.000,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 255.185.170,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 62.283.640,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 716.212.600,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 160.986.066,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 47.708.000,-
	2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 8.534.400,-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 102.423.215,-
	2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 463.866.618,-
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 12.054.000,-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMMU</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 11.900.000,-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 64.719.685,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 4.051.608.743,-</b>

	Kecamatan Dusun Tengah (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.856.000,- Rp. 2.766.415.531,- Rp. 29.687.500,- Rp. 255.235.715,- Rp. 38.425.000,- Rp. 1.161.500.000,- Rp. 84.145.440,-
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 36.360.000,- Rp. 13.640.000,-
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rp. 15.620.000,- Rp. 220.487.335,- Rp. 387.600.000,- Rp. 216.000.000,-
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.000.000,-
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 103.993.850,-
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 107.999.025,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.461.733.396,-</b>



	Kecamatan Dusun Timur (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.871.500,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.792.593.886,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 115.097.350,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 485.508.810,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 199.429.950,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 958.258.000,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 110.894.820,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 60.450.000,-
	2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 137.116.500,-
	3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 24.773.400,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 204.075.000,-
	2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 130.922.230,-
	3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 51.000.000,-
	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rp. 180.000.000,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35.550.000,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 13.650.000,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 22.613.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.588.804.446,-</b>

	Kecamatan Karusen Janang (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 41.060.000,-  Rp. 1.795.001.940,- Rp. 32.656.250,- Rp. 459.621.025,-  Rp. 517.820.000,-  Rp. 364.240.246,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 16.450.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 98.837.500,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.500.000,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 2.500.000,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 4.200.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.342.886.961,-</b>

	Kecamatan Paju Epat (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.442.400,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.472.440.278,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 65.374.025,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 250.007.540,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 39.172.085,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 444.614.915,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 54.331.494,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 52.425.000,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 16.750.000,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 16.875.000,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 24.975.000,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 26.365.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 2.485.772.737,-</b>

	Kecamatan Paku (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 19.455.000,- Rp. 2.411.315.120,- Rp. 24.093.950,- Rp. 279.302.960,- Rp. 20.375.000,- Rp. 524.500.000,- Rp. 55.286.176,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 191.987.085,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 17.649.730,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19.692.200,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 10.255.000,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 40.358.400,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.628.351.621,-</b>

	Kecamatan Patangkep Tutui (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.647.345.340,- Rp. 48.750.000,- Rp. 247.370.220,- Rp. 46.907.500,- Rp. 654.898.798,- Rp. 79.476.438,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 64.000.000,-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 56.597.000,-
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 12.500.000,-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 25.750.000,-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 6.575.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 2.890.170.296,-</b>

	Kecamatan Pematang Karau (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1,654,388,730,- Rp. 169,540,900,- Rp. 251,178,000,- Rp. 11,297,433,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 12,360,000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 2.098.765.063,-</b>

	Kecamatan Raren Batuah (Kewilayahan)	
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.920.000,-  Rp. 1.774.570.000,- Rp. 30.937.500,- Rp. 232.001.300,- Rp. 39.317.790,-  Rp. 652.810.670,- Rp. 77.627.588,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 10.000.000,-  Rp. 122.992.240,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 26.500.000,- Rp. 19.989.000,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.000.000,-  Rp. 37.000.000,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 81.800.000,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 78.572.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.299.718.088,-</b>

	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik (Urusan Pemerintahan Umum)</b>	
<b>No</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 40.142.000,-
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.541.979.746,-
	3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 69.562.500,-
	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 545.219.600,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 491.121.125,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 859.427.400,-
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 157.596.316,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	
	1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.381.749.650,-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	
	1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 1.485.181.625,-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	
	1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 94.430.210,-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	
	1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 571.230.220,-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	
	1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.043.077.945,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 10.280.718.337,-</b>



### **1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

#### **a. Latar belakang Penerapan SPM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penanganan Urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar Otonomi Daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini agar kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap sejalan dengan Tujuan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan Nasional terkait pemenuhan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Laporan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya memuat antara lain yaitu Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Ketersediaan Anggaran dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrument dalam Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, Pengembangan Kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan Penyempurnaan kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal juga merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri 6 bidang antara lain yaitu Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Urusan Sosial.

b. Dasar Hukum Penerapan SPM

Untuk melaksanakan pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa "Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom".

Dasar Hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ketentraman, Ketertibam Umum Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman, Ketertibam Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1687);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- c. Kebijakan Umum Daerah

Strategi Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah / ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran.

Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro dapat diukur menggunakan Indikator Kinerja Makro dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro**

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan %
1	2	4	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,21	74,81	0,80
2	Angka Kemiskinan	8,59	8,74	1,74
3	Angka Pengangguran	3,37	3,26	-3,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,47	4,29	23,63
5	Pendapatan Per Kapita	92,95	91,90	-1,13
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,331	0,299	-9,66

*Sumber Kabupaten Bartim dalam angka 2025*


## **2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan Capaian Kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data / informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang data / informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

### **2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) memuat data / informasi keberhasilan kinerja pemerintah daerah setiap urusan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Pertanahan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Koperasi UKM, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olah raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Energi Sumber Daya Mineral, Urusan Perdagangan, dan Urusan Perindustrian. Capaian Kinerja Kunci Hasil dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{3.377}{3736} \times 100\% = 90,39\%$ <p>A = <i>Jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</i> adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar = 3.377  B = <i>Jumlah anak usia 5–6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan.</i> =3.736</p>	Dinas Pendidikan	
		2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{12.015}{12.107} \times 100\% = 99,24\%$ <p>A = <i>Jumlah anak usia 7–12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</i> = 12.015  B = <i>Jumlah anak usia 7–12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan</i> = 12.107</p>	Dinas Pendidikan	
		3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{5.651}{6.559} \times 100\% = 86,15\%$ <p>A = <i>Jumlah anak usia 13–15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</i> = 5.651  B = <i>Jumlah anak usia 13–15 tahun pada Kabupaten/kota yang bersangkutan</i> =6.559</p>	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{141}{24.990} \times 100\% = 0,56\%$ <p>A = Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 141  B = Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan = 24.990</p>	Dinas Pendidikan	
2.	KESEHATAN	1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{123}{118.665} = 1,036\%$ <p>A = Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 123  B = Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 118.665</p>	Dinas Kesehatan	
		2) Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1  B = Jumlah RS di kabupaten/kota = 1</p>	Dinas Kesehatan	
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{1.695}{2.201} \times 100\% = 77,01\%$ <p>A = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 1.695</p>	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			B = <i>Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota</i> = 2.201		
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{1.630}{2.101} \times 100\% = 77,58\%$ A = <i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i> = 1.630 B = <i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i> = 2.101	Dinas Kesehatan	
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{1.628}{2.001} \times 100\% = 81,35\%$ A = <i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> = 1628 B = <i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i> = 2.001	Dinas Kesehatan	
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{9.596}{10.794} \times 100\% = 88,90\%$ A = <i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> = 9.596 B = <i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i> = 10.794	Dinas Kesehatan	
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{9.733}{12.054} \times 100\% = 80,74\%$ A = <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> = 9.733 B = <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i> = 12.054	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{62.106}{86.488} \times 100\% = 71,80\%$ <p>A = Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 62.106  B = Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota = 86.488</p>	Dinas Kesehatan	
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{11.526}{15.266} \times 100\% = 75,50\%$ <p>A = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 11.526  B = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota = 15.266</p>	Dinas Kesehatan	
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{21.232}{21.714} \times 100\% = 97,78\%$ <p>A = Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 21.232  B = Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 21.714</p>	Dinas Kesehatan	
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{1.154}{1.191} \times 100\% = 96,89\%$ <p>A = Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1.154  B = Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</p>	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			=1.191		
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{185}{198} \times 100\% = 93,43\%$ <p>A = Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 185  B = Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 198</p>	Dinas Kesehatan	
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{1.449}{1.469} \times 100\% = 98,63\%$ <p>A = Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1.449  B = Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 1.469</p>	Dinas Kesehatan	
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{2.221}{2.873} \times 100\% = 77,30\%$ <p>A = Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 2.221  B = Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 2.873</p>	Dinas Kesehatan	
3.	PEKERJAAN UMUM	1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{40,07}{84,36} \times 100\% = 47,49\%$ <p>A = Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan</p>	Dinas PU, PR, Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>Kab/Kota (ha) = 40,07</i> B = <i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 84,36</i>		
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ A = <i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = .0</i> B = <i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 0.</i>	Dinas PU, PR, Perkim	
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{2.133}{4.611} \times 100\% = 46,25\%$ A = <i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) = 2.133</i> B = <i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota = 4.611</i>	Dinas PU, PR, Perkim	
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	$\frac{26.661}{30.783} \times 100\% = 86,60\%$ A = <i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah</i>	Dinas PU, PR, Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota	$\frac{kabupaten/kota = 26.661}{B = \text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut} = 30.783}$		
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{26.377}{30.783} \times 100\% = 85,68\%$ $A = \text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD} = 26.377$ $B = \text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota} = 30.783$	Dinas PU, PR, Perkim	
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{73}{73} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya} = 73$ $B = \text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku} = 73$	Dinas PU, PR, Perkim	
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{304,56}{727,66} \times 100\% = 41,85\%$ $A = \text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap} = 304,56$ $B = \text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota} = 727,66$	Dinas PU, PR, Perkim	
		8) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{23}{50} \times 100\% = 46,00\%$	Dinas PU, PR, Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>A = <i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i> = 23</p> <p>B = <i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</i> = 50</p>		
		9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{330}{330} \times 100\% = 100\%$ <p>A = <i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i> = 330</p> <p>B = <i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</i> = 330</p>	Dinas PU, PR, Perkim	
4.	PERUMAHAN RAKYAT	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = <i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i> = 0</p> <p>B = <i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</i> = 0</p>	Dinas PU, PR, Perkim	
		2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = <i>Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah</i></p>	Dinas PU, PR, Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>Layak Huni</i> = 0 $B = \frac{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} = 0$		
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{13,28}{21,08} \times 100\% = 62,99\%$ $A = \text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)} = 13,28$ $B = \text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha} = 21,08$	Dinas PU, PR, Perkim	
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{2.781}{30.783} \times 100\% = 9,03\%$ $A = \text{Jumlah unit rumah tidak layak huni} = 2.781$ $B = \text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota} = 30.783$	Dinas PU, PR, Perkim	
		5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{53}{30.783} \times 100\% = 0,17\%$ $A = \text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU} = 53$ $B = \text{Jumlah unit rumah kab/kota} = 30.783$	Dinas PU, PR, Perkim	
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan} = 4$ $B = \text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk} = 4$	SatpolPP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p>A = <i>Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi</i> =3  B = <i>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</i> =3</p>	SatpolPP	
		3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{158}{50} \times 100\% = 316\%$ <p>A = <i>Jumlah</i> warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana =158  B = <i>Jumlah</i> warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan =50</p>	BPBD dan Damkar	
		4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ <p>A = <i>Jumlah</i> warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana =100  B = <i>Jumlah</i> warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana = 100</p>	BPBD dan Damkar	
		5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{2467}{2467} \times 100\% = 100\%$ <p>A = <i>Jumlah</i> warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana =2467  B = <i>Jumlah</i> warga negara yang menjadi korban bencana =2467</p>	BPBD dan Damkar	
		6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{63}{28} \times 100\% = 225\%$ <p>A = <i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota</i></p>		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah = 63</p> <p>B = Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 28</p>	BPBD dan Damkar	
		7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap = 22,035 menit	BPBD dan Damkar	
6.	SOSIAL	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{41}{596} \times 100\% = 6,87\%$ <p>A = Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 41</p> <p>B = Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 596</p>	Dinas PMD & Sosial	
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{43}{43} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 43</p> <p>B = Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota = 43</p>	Dinas PMD & Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	TENAGA KERJA	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{6}{13} \times 100\% = 46,15\%$ <p>A = Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD =6  B = jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota =13</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
		2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{0}{8955} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 0  B = Jumlah tenaga kerja keseluruhan =8955</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{10.914.980.000}{8955} \times 100\%$ $= 121.886.991,50\%$ <p>A = PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) =10.914.980.000  B = Jumlah tenaga kerja = 8955</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
		4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{10}{45} \times 100\% = 22,22\%$ <p>A = Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak =10  B = Jumlah perusahaan =45</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{137}{1.383} \times 100\% = 9,90\%$ <p>A = <i>Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan</i> = 137  B = <i>Jumlah pencari kerja yang terdaftar</i> = 1.383</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
8.	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{27.703.733.088}{1.084.407.160.908} \times 100\% = 2,55\%$ <p>A = <i>Jumlah ARG pada belanja</i> operasional dan modal <i>APBD</i> = Rp. 27.703.733.088  B = <i>Jumlah seluruh belanja</i> operasional dan modal <i>di APBD</i> = Rp. 1.084.407.160.908</p>	Dinas PPPAKB	
		2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$ <p>A = <i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</i> = 9  B = <i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kab/kota</i> = 9</p>	Dinas PPPAKB	
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{5}{41.566} \times 100.000 = 12,029\%$ <p>A = <i>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</i> = 5  B = <i>Jumlah penduduk perempuan</i> = 41.566</p>	Dinas PPPAKB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	PANGAN	1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras)	$\frac{18,64}{10.218} \times 100\% = 0,18\%$ <p>A = <i>Jumlah cadangan pangan</i> pemerintah Kab/kota = 18,64  B = <i>Jumlah target cadangan pangan pemerintah Kab.kota yang ditetapkan</i> = 10.218</p>	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	
10.	PERTANAHAN	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{131.817.422}{3.650.728.400} \times 100\% = 3,61\%$ <p>A = <i>Luas tanah sesuai peruntukkan</i> kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) = 131.817.422  B = <i>Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)</i> = 3.650.728.400</p>	Setda	
		2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = <i>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i> = 0  B = <i>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i> = 0</p>	Setda	
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = <i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas</i> kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang = 0  B = <i>Luas tanah diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diterbitkan</i> = 0</p>	Setda	
		4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Setda	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	<p>A = <i>Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha</i> = 0</p> <p>B = <i>Jumlah penerima tanah obyek landreform</i> = 0</p>		
		5) Tersedianya tanah untuk masyarakat	<p><math>\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%</math></p> <p>A = <i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah</i> = 0</p> <p>B = <i>Luas izin membuka tanah</i> yang diterbitkan = 0</p>	Setda	
		6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	<p><math>\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%</math></p> <p>A = <i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i> = 0</p> <p>B = <i>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i> = 0</p>	Setda	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	<p>IKLH Prov = (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (ITH x 0,219) = 54,71 + 91,02 + 42,14 = 66,66</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IKD = Indeks Kualitas Udara</p> <p>ITH = Indeks Tutupan Hutan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	
		2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	<p><math>\frac{14.688}{55728,64} \times 100\% = 26,35\%</math></p> <p>A = <i>Total volume sampah yang dapat ditangani</i> = 14.688</p>	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			B = <i>total volume timbunan sampah kabupaten/kota</i> = 55728,64		
		3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{2}{28} \times 100\% = 7,14\%$ <p>A = <i>Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota</i> = 2</p> <p>B = <i>usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</i> = 28</p>	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1) Perekaman KTP Elektronik	$\frac{84.009}{87.036} \times 100\% = 96,52\%$ <p>A = <i>umlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP</i> = 84.009</p> <p>B = <i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas</i> = 87.036</p>	Dinas Dukcapil	
		2) Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{16.092}{31.004} \times 100\% = 51,90\%$ <p>A = <i>Jumlah anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</i> = 16.092</p> <p>B = <i>Jumlah anak usia 0–17 tahun</i> = 31.004</p>	Dinas Dukcapil	
		3) Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{30.332}{33.008} \times 100\% = 91,89\%$ <p>A = <i>Jumlah anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta lahir</i> = 30.332</p>	Dinas Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			B = <i>Jumlah anak usia 0–18 tahun</i> = 33008		
		4) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{2}{26} \times 100\% = 7,69\%$ <p>A = <i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i> = 2  B = <i>Jumlah OPD</i> = 26</p>	Dinas Dukcapil	
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>A = <i>Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun</i> = 1  B = <i>Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)</i> = 1</p>	Dinas PMD & Sosial	
		2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{1}{67} \times 100\% = 1,49\%$ <p>A = <i>Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</i> = 1  B = <i>Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)</i> = 67</p>	Dinas PMD & Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p> TFR = Angka Kelahiran Total = 2,15  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur = 26,7  bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu = .....  pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama = .....  i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) = .....  K = Bilangan Konstanta biasanya 1000 = ..... </p>	Dinas PPPAKB	
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Rate/mCPR)	$\frac{15.482}{19.199} \times 100\% = 80,63\%$ <p> A = Jumlah peserta KB aktif modern = 15.482  B = Jumlah Pasangan Usia Subur = 19.199 </p>	Dinas PPPAKB	
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{644}{19.199} \times 100\% = 3,35\%$ <p>A = Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak</p>	Dinas PPPAKB	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$terlayani = 664$ $B = \text{Jumlah Pasangan Usia Subur} = 19.199$		
15.	PERHUBUNGAN	1) Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	<p>Rasio Konektivitas = <math>0/0 \times 100 = 371</math></p> <p>Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)</li> <li>IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)</li> </ul> <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun</li> </ul>	Dinas Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</li> <li>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</li> <li>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</li> <li>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</li> </ol> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</li> <li>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</li> <li>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</li> </ol>		
		2) V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota = 0,18	Dinas Perhubungan	
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	$\frac{1}{36} \times 100\% = 2,77\%$ <p>A = jumlah OPD yang terhubung dengan akses</p>	Dinas Kominfosantik	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i> = 1 B = <i>Jumlah OPD</i> = 36		
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ A = <i>Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</i> = 30 B = <i>Jumlah layanan publik</i> = 30	Dinas Kominfosantik	
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{3.886}{84.926} \times 100\% = 4,57\%$ A = <i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota</i> = 3.886 B = <i>Jumlah penduduk</i> = 84.926	Dinas Kominfosantik	
17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{14}{66} \times 100\% = 21,21\%$ A = <i>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset</i> = 14 B = <i>Jumlah seluruh koperasi</i> = 66	Dinas Perdagangan & Koperasi UKM	
		2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{502}{5393} \times 100\% = 9,30\%$ A = <i>Jumlah pertumbuhan wirausaha baru</i> = 502	Dinas Perdagangan & Koperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			B = <i>Jumlah usaha mikro keseluruhan</i> = 5393	UKM	
18.	PENANAMAN MODAL	1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{651.434.070.000}{673.626.300.000} \times 100\% = 96,70\%$ <p>A = <i>(Jumlah inestasi tahun n–jumlah investasi tahun n–1)di kabupaten/kota = (1.325.060.370.000-673.626.300.000)</i>  B = <i>Jumlah investasi tahun n–1 di provinsi = 673.626.300.000</i></p>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = <i>(Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota = 0</i>  B = <i>Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota = 0</i></p>	Dinas Budparpora	
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{743}{30.024} \times 100\% = 2,42\%$ <p>A = <i>(Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 743</i>  B = <i>Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota = 30.024</i></p>	Dinas Budparpora	
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 0	Dinas Budparpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	STATISTIK	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{22}{26} \times 100\% = 84,61\%$ <p>A = Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 22  B = Jumlah OPD = 26</p>	Dinas Kominfosantik	
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{22}{26} \times 100\% = 84,61\%$ <p>A = (Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 22  B = Jumlah OPD = 26</p>	Dinas Kominfosantik	
21.	PERSANDIAN	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{365}{645} \times 100\% = 56,58\%$ <p>A = (Jumlah nilai per area keamanan informasi = 365  B = Jumlah area penilaian = 645</p>	Dinas Kominfosantik	
22.	KEBUDAYAAN	1) Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{253}{272} \times 100\% = 93,01\%$ <p>A = (Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 253  B = Jumlah cagar budaya yang ditetapkan = 272</p>	Dinas Budparpora	
23.	PERPUSTAKAAN	1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<p>Nilai = 62,076%</p> <p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang</p>	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	dan Kearsipan	
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks = 53,41%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	KEARSIPAN	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (100+100+100+0)/4 = 75\%$ <p> T = Tingkat ketersediaan arsip  a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 100  i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 100  s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 100  j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 0 </p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (0 + 100 + 100 + 0 + 100 + 0)/6 = 50\%$ <p> T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban  m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK  b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK  g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah </p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$\frac{2321,20}{2714,81} \times 100\% = 85,50\%$ A = Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kab/kota = 2321,20 B = Target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang ditetapkan = 2714,81	Dinas Perikanan & Peternakan	
26.	PARIWISATA	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{-49}{72} \times 100\% = -68,05\%$ A = Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 = 23-72 B = Jumlah wisatawan tahun n-1 = 72	Dinas Budparpora	
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{15.980}{16.482} \times 100\% = 96,95\%$ A = Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 = 32.462-16.482 B = Jumlah wisatawan tahun n-1 = 16.482	Dinas Budparpora	
		3) Tingkat hunian akomodasi	$\frac{3116}{75.920} \times 100\% = 4,10\%$ A = Jumlah kamar yang terjual = 3116	Dinas Budparpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			B = <i>Jumlah kamar yang tersedia</i> = 75.920		
		4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{140,95}{10.914,98} \times 100\% = 1,29\%$ <p>A = Total nilai kontribusi sector pariwisata pada PDRB = 140,95  B = Total PDRB berlaku = 10.914,98</p>	Dinas Budparpora	
		5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{2.903.760.060,50}{60.883.215.810,61} \times 100\% = 4,76\%$ <p>A = Total realisasi PAD dari sector pariwisata = 2.903.760.060,50  B = Total realisasi PAD = 60.883.215.810,61</p>	Dinas Budparpora	
27.	PERTANIAN	1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{41388,79}{8492,85} \times 100\% = 487,33\%$ <p>A = Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 41388,79  B = Luas panen = 8492,85</p>	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	
		2) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{-7}{10} \times 100\% = -70\%$ <p>A = Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya = 3-10  B = Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 10</p>	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	
28.	KEHUTANAN				
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA	1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	MINERAL	memiliki ijin di kab/kota	$A = \text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin} = 0$ $B = \text{perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin} = \text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi} = 0$		
30.	PERDAGANGAN	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	$\frac{554}{810} \times 100\% = 68,39\%$ $A = \text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan} = 554$ $B = \text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota} = 810$	Dinas Perdagangan & Koperasi UKM	
		2) Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{188.841}{709} \times 100\% = 26,63\%$ $A = \text{Realisasi} = 188.841$ $B = \text{RDKK} = 709$	Dinas Perdagangan & Koperasi UKM	
		3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{324}{357} \times 100\% = 90,75\%$ $A = \text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan} = 324$ $B = \text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota} = 357$	Dinas Perdagangan & Koperasi UKM	
30.	PERINDUSTRIAN	1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{67}{856} \times 100\% = 7,82\%$ $A = \text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun}$	Dinas Nakertrans & Perindustrian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$n$ – jumlah industri kecil dan menengah tahun $n-1 = 923-856$ $B = \text{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun } n-1 = 856$		
		2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<p>Nilai = 0.%</p> <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah <math>(100/N)\%</math></p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali <math>(100/N)\%</math></p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><math>A = \text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan} = 0</math>  <math>B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 0</math></p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><math>A = \text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan} = 0</math>  <math>B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = .0</math></p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0  B = Jumlah izin yang dikeluarkan = ..0</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>Nilai = 0%</p> <p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)</li> <li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</li> <li>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li> </ul> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>	Dinas Nakertrans & Perindustrian	
31.	TRANSMIGRASI				

### **2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Pengadaan, Urusan Kepegawaian, Urusan Manajemen Keuangan dan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan Dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{156.544.911.422}{1.181.785.125.539,45} = 13,24\%$ <p> <i>A = Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan = Rp. 156.544.911.422</i>  <i>B = Jumlah APBD = Rp. 1.181.785.125.539,45</i> </p>	BPKAD	
		2) Rasio PAD	$\frac{44.033.318.808,02}{1.147.129.218.345,02} \times 100\% = 3,83\%$ <p> <i>A = Jumlah PAD = Rp. 44.033.318.808,02</i>  <i>B = Jumlah pendapatan pada APBD = Rp. 1.147.129.218.345,02</i> </p>	BPKAD	
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas <b>SPIP level 3</b> berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat	
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas <b>APIP level 3</b> berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{934.395.990.138,01}{1.181.785.125.539,45} \times 100\% = 79,06\%$ <p>A = <i>Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures</i> = Rp (1.099.965.128.566,01 - 165.569.138.428)  B = <i>Jumlah belanja APBD</i> = Rp. 1.181.785.125.539,45</p>	BPKAD	
		6) Opini Laporan Keuangan	WTP =8 kali WDP =2 kali	Inspektorat	
2.	PENGADAAN	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{1.050} \times 100\% = 0\%$ <p>A = <i>Jumlah kontrak infrastuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0</i>  B = <i>Jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1.050</i></p>	PPBJ	
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{1.037}{1.050} \times 100\% = 98,76\%$ <p>A = <i>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</i> =1.037  B = <i>Jumlah seluruh pengadaan</i> =1.050</p>	PPBJ	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{282.435.194.409}{627.372.634.970,25} \times 100\% = 45,01\%$ <p>A = <i>Jumlah nilai belanja</i> modal dan operasional yang melalui pengadaan = 282.435.194.409  B = <i>Total belanja</i> modal dan operasional = 627.372.634.970,25</p>	PPBJ	
		4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah	$\frac{21.640.633.495}{247.750.509.102} \times 100\% = 8,73\%$ <p>A = Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = (269.391.142.597 - 247.750.509.102)  B = Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 247.750.509.102</p>		
4.	KEPEGAWAIAN	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.028}{1.411} \times 100\% = 72,85\%$ <p>A = <i>Jumlah</i> seluruh <i>pegawai</i> pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1.028  B = <i>Seluruh jumlah pegawai</i> = 1.411</p>	BKPSDM	
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{156}{1.399} \times 100\% = 11,15\%$ <p>A = <i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i> = 156  B = <i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i> = 1.399</p>	BKPSDM	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{25}{156} \times 100\% = 16,02\%$ <p>A = Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 25  B = Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 156</p>	BKPSDM	
5.	MANAJEMEN KEUANGAN	1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[ \left[ \frac{1.181.785.125.539,45}{1.191.039.616.217} \right] - 1 \right] \times 100\% = 0,77\%$ <p>A = Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = Rp. 1.181.785.125.539,45  B = total belanja APBD = Rp. 1.191.039.616.217</p>	BPKAD	
		2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[ \left[ \frac{44.323.459.458,02}{96.370.883.903} \right] - 1 \right] \times 100\% = 54,00\%$ <p>A = Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = Rp. 44.323.459.458,02  B = Total PAD dalam APBD = Rp. 96.370.883.903</p>	BPKAD	
		3) Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)	BPKAD	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{94.623.500.299,30}{2.273.722.665.814,61} \times 100\% = 4,16\%$ <p>A = Nilai realisasi SiLPA = Rp. 94.623.500.299,30  B = Total belanja anggaran tahun sebelumnya = Rp. 2.273.722.665.814,61</p>		
6.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{27}{36} \times 100\% = 75\%$ <p>A = Realisasi <i>Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda</i> = 27  B = Anggaran <i>belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda</i> = 36</p>	Dinas Kominfosantik	
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{5}{12} \times 100\% = 41,66\%$ <p>A = Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda = 5  B = Total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12</p>	Dinas Kominfosantik	

## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas.

Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategis organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif yang lain LAKIP merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *Good Governance*, atau sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur ini didasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Selain itu pula penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 juga didasarkan pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 – 2028, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka penyusunan LKIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024. Dalam periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur.

#### a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang dengan perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 - 2026 ,Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, APBD Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Akhir RPD
<b>1</b>	<b>Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.</b>	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,28
		b. Angka Kemiskinan	5,38	5,32
	1.1 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggul Daerah	Laju PDRB Sektor Unggulan	3,56	4,31
	1.2 Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah	PAD Sektor Pariwisata	200.000.000,-	250.000.000,-
	1.3 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	0,3	0,22
<b>2</b>	1.4 Meningkatnya Investasi Daerah	a. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	53,8 M	65 M
		b. Nilai Investasi Berskala Internasional (PMA)	3900 US\$	4810 US\$
	<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	72,42	74,48
	2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,52	68,54
	2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	a. Rata-Rata Lama Sekolah	9,37	9,42
		b. Harapan Lama Sekolah	12,87	12,91
	2.3 Meningkatnya Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85	86,05

3	<b>Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan</b>	Indeks Infrastruktur	52	54
	3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	80,63	82,42
	3.2 Meningkatnya Potensi Kelstarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	70,76
4	<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B
	4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	a. Predikat SAKIP	B	B
		b. Opini BPK	WTP	WTP
	4.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,59	3,59

#### b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja tahun 2024 terdapat sasaran, Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun APBN. Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel 2.5

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah**  
**Kabupaten Barito Timur**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Akhir RPD	Realisasi	Capaian Kinerja
1	<b>Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.</b>	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,28	4,29	106,98
		b. Angka Kemiskinan	5,38	5,32	6,66	80,78
	1.1 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggul Daerah	Laju PDRB Sektor Unggulan	3,56	4,31	38,11	1070,51%
	1.2 Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah	PAD Sektor Pariwisata	200.000.000,-	250.000.000,-	2.903.760.060,50	1.451,88%
	1.3 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	0,3	0,22	0,299	99,66

	1.4	Meningkatnya Investasi Daerah	a. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	53,8 M	65 M	482.781.020,00	0,502%
			b. Nilai Investasi Berskala Internasional (PMA)	3900 US\$	4810 US\$	123.796,88 US\$	0,004126%
<b>2</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	72,42	74,48	74,81	103,300%
	2.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,52	68,54	69,02	100,74
	2.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	a. Rata-Rata Lama Sekolah	9,37	9,42	9,54	101,82
			b. Harapan Lama Sekolah	12,87	12,91	12,88	100,08
	2.3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85	86,05	N/a	N/a
<b>3</b>		<b>Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan</b>	Indeks Infrastruktur	52	54	57,57	71,40
	3.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	80,63	82,42	57,57	71,40
	3.2	Meningkatnya Potensi Kelstarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	70,76	66,66	96,95 %
<b>4</b>		<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B
	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelengaraa n Pemerintah	a. Predikat SAKIP	B	B	B	B
			b. Opini BPK	WTP	WTP	-	-
	4.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,59	3,59	3,32	92,48%

**c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya**

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6

**Tabel 2.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah**  
**Kabupaten Barito Timur**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Akhir RPD	Realisasi	Capaian Kinerja
1	<b>Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.</b>	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,28	4,29	106,98
		b. Angka Kemiskinan	5,38	5,32	6,66	80,78
	1.1 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Unggul Daerah	Laju PDRB Sektor Unggulan	3,56	4,31	38,11	1070,51%
	1.2 Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Daerah	PAD Sektor Pariwisata	200.000.000,-	250.000.000,-	2.903.760.060,50	1.451,88%
	1.3 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	0,3	0,22	0,299	99,66
2	1.4 Meningkatkan Investasi Daerah	a. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	53,8 M	65 M	482.781.020,00	0,502%
		b. Nilai Investasi Berskala Internasional (PMA)	3900 US\$	4810 US\$	123.796,88 US\$	0,004126%
	<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	72,42	74,48	74,81	103,300%
	2.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,52	68,54	69,02	100,74
	2.2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	a. Rata-Rata Lama Sekolah	9,37	9,42	9,54	101,82
		b. Harapan Lama Sekolah	12,87	12,91	12,88	100,08
	2.3 Meningkatkan Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85	86,05	N/a	N/a



3	<b>Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan</b>	Indeks Infrastruktur	52	54	57,57	71,40
	3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	80,63	82,42	57,57	71,40
	3.2 Meningkatnya Potensi Kelstarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	70,76	66,66	96,95 %
4	<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B
	4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Predikat SAKIP	B	B	B	B
		b. Opini BPK	WTP	WTP	-	-
	4.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,59	3,59	3,32	92,48%

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah**  
**Kabupaten Barito Timur Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Akhir RPD	Realisasi	Capaian Kinerja
1	<b>Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.</b>	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,28	3,47	86,53
		b. Angka Kemiskinan	5,42	5,32	6,63	122,32
	1.1 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggul Daerah	Laju PDRB Sektor Unggulan	3,24	4,31	42,03	1297,22%
	1.2 Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah	PAD Sektor Pariwisata	550.000.000.-	250.000.000,-	38.056.000,-	6,92%
	1.3 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	0,3	0,22	0,331	110,33
	1.4 Meningkatnya Investasi Daerah	a. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	96 M	65 M	482.781.020,00	0,502%
		b. Nilai	3000 Jt US\$	4810 US\$	123.796,88	0,004126

		Investasi Berskala Internasional (PMA)			US\$	
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	72,20	74,48	72,20	100,69
	2.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,51	68,54	68,91	100,58
	2.2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	a. Rata-Rata Lama Sekolah	9,35	9,42	9,45	101,07
		b. Harapan Lama Sekolah	12,86	12,91	12,87	100,08
	2.3 Meningkatkan Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,00	86,05	89,20	106,190
<b>3</b>	<b>Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan</b>	Indeks Infrastruktur	79,04	54	63,89	80,83
	3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	79,04	82,42	63,89	80,83
	3.2 Meningkatkan Potensi Kelstarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,26	70,76	N/a	N/a
<b>4</b>	<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	CC	100%
	4.1 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	a. Predikat SAKIP	B	B	CC	100%
		b. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%
	4.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,59	3,59	3,22	89,69

## Tujuan 1 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan perluasan Lapangan Pekerjaan

### a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 adalah

3,47%. Angka ini menurun dari tahun 2022 yang sebesar 6,06%. Sementara itu, pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur mengalami peningkatan menjadi 4,29%.

- Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.
- Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program, seperti peningkatan infrastruktur, investasi, dan pengembangan bisnis.

#### Peningkatan infrastruktur

- Meningkatkan akses jalan
- Menyediakan air bersih bagi seluruh desa
- Membangun jaringan listrik
- Membangun tanggul penangkal banjir
- Membangun gedung serbaguna
- Menyaring sungai
- Membangun pagar keliling kantor kecamatan

#### Investasi

- Penanaman Modal Asing (PMA)
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Bank Kalteng)

Pengembangan bisnis Mengembangkan bisnis waralaba, Memodernisasi pasar tradisional.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor. Untuk memastikan implementasi program-program tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengevaluasi program-program tersebut secara berkala.

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah. Angka ini didapatkan dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Definisi kemiskinan

- Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
- Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Cara menghitung angka kemiskinan

- Garis kemiskinan (GK) dihitung dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
- Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK masuk ke dalam kategori penduduk miskin.

Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Barito Timur sebesar 6,66%, angka ini didasarkan pada jumlah penduduk miskin sebanyak 8.740 jiwa, target 2024 adalah sebesar 5,38 maka capaian kinerja 80,78%. Sedangkan pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Barito Timur sebesar 6,63%. Angka ini didasarkan pada jumlah penduduk miskin sebanyak 8.590 jiwa, target 2023 adalah sebesar 4,01 maka capaian kinerja 165,33%. Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Timur tahun 2024 naik 0.03% dibanding tahun 2023.

Adapun program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terutama untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Sosial, serta pelatihan keterampilan yang dibiayai dengan APBN, APBD dan Dana Desa .

### **Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah.**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 (tujuh) komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu

sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar 10.914,98 (miliar rupiah) meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 10.905,12 (miliar rupiah). Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (38,11%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,43 %), dan Konstruksi (8,00%).

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2024 sebesar 6.108,02 (miliar rupiah). Meningkat sebesar 109,33 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 5.856,57 (miliar rupiah).

PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2024 mengalami peningkatan. PDRB perkapita tahun 2023 ADHB sebesar 57,90 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB perkapita tahunan 2023 ADHK sebesar 41,02 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,00 persen.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah**

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu disuatu tempat yang memiliki keunikan, keindahan, kemudahan dan nilai yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam maupun buatan manusia yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat oleh wisatawan.

Barito Timur memiliki dan menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Potensi pariwisata di kabupaten Barito Timur sangat menjanjikan jika mampu dikelola secara maksimal kabupaten Barito Timur memiliki potensi alam, budaya yang bisa dimanfaatkan dan dikelola.

Sektor pariwisata di kabupaten Barito Timur memerlukan pembenahan serta optimalisasi. Keberadaan destinasi wisata menjadi salah satu wadah bagi masyarakat Barito Timur yang membutuhkan tempat hiburan /refresing melepas rasa lelah, kejenuhan dari rutinitas kerja.

Pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi ikon daerah namun mampu memberi nilai tambah bagi ekonomi masyarakat Barito Timur, sektor pariwisata berpotensi membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

apabila dikembangkan dan dikelola secara optimal dan Sebagai salah satu sumber PAD (pendapatan asli daerah) bagi kabupaten Barito Timur. Melalui sektor pariwisata pemanfaatan obyek wisata yang memiliki potensi bisa memaksimalkan sebuah wisata menjadi bernilai ekonomi.

Pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan serta meningkatkan pembangunan sektor pariwisata. Potensi obyek wisata yang menarik dikembangkan seperti air terjun riam kendong, wisata alam desa pulau patai, kawasan wisata Lewu Hante dengan pemandangan indah dan ritual –ritual adat sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Barito TIMUR. Banyak tempat wisata di Barito Timur merupakan sebuah potensi yang terpenting untuk dikelola dan ditangani dengan baik. Agar potensi tersebut dapat memberi kontribusi bagi perkembangan daerah baik dari segi ekonomi sosial masyarakat dan juga pelestarian lingkungan hidup.

Saat ini Pemerintah daerah berkomitmen bersama menyangkut banyak hal kewenangan lintas sektoral meningkatkan Pembangunan infrastruktur di kawasan wisata yang akan memudahkan wisatawan menuju obyek-obyek wisata /lokasi wisata potensial. Selain itu untuk memperlancar aktivitas masyarakat sehingga pembangunan dan perekonomian meningkat.

Dari data Dinas Pariwisata Kabupaten Barito Timur Kontribusi PAD Sektor Pariwisata yang diambil dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2024 target Rp .200.000.000,- realisasi Rp. 2.903.760.060,50 atau dengan capaian kinerja 1.451,88 % sedangkan pada tahun 2023 target Rp. 167.592.000,- realisasi Rp. 38.056.000,- atau dengan capaian kinerja 22,71%.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat**

Gini (*gini ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini mendekati 1, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Realisasi indeks gini Kabupaten Barito Timur tahun 2024 sebesar , sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 0,331 sedangkam realisasi tahun 2022

0,33 sehingga capaian realisasi indeks gini pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,032 dibandingkan dengan tahun 2023, yang berarti bahwa distribusi pendapatan kurang merata. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Barito Timur berada pada tingkat ketimpangan sedang.

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah**

Realisasi indikator persentase peningkatan realisasi investasi PMDN pada tahun 2024 adalah 1.011.144.200.000,- dari target sebesar Rp 53,8 M dengan kata lain target tercapai 1879%, sedangkan tahun 2023 realisasi investasi PMDN adalah Rp. 482.781.020.000,- dari target 96 M dengan kata lain target tercapai 0,502% ,Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan realisasi investasi di Tahun 2024 pada Kabupaten Barito Timur adalah:

- Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi.
- Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Timur.
- Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Timur.
- Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- Adanya perusahaan besar yang ada di Kabupaten Barito Timur.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tahun 2024 adalah:

- Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Barito Timur.
- Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
- Kurang Realistisnya target yang dijabarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



Data persentase peningkatan realisasi investasi pada Kabupaten Barito Timur terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun kinerja ini tidak dijadikan kinerja strategis Kepala Dinas sehingga tidak menjadi program/kegiatan utama OPD. Namun melekat dan tugas dan fungsi OPD yang tersirat di dalam program dan kegiatan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/ kota); Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota); dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota). Hal ini juga mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

## **Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.**

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia, didasarkan pada tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

#### Dimensi Utama:

- Umur Panjang dan Sehat: Diukur melalui harapan hidup saat lahir.
- Pengetahuan: Diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- Standar Hidup Layak: Diukur melalui pengeluaran per kapita.

#### Pencetus:

Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

#### Manfaat:

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Timur mencatat, Indeks Pembangunan Manusia 2024 mencapai 74,81 tumbuh 2,11 poin dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 72,70. Jika dibandingkan target RPD IPM tahun 2024 yaitu 72,42 dengan realisasinya sebesar 74,81 tahun, maka capaian kinerjanya adalah 103,300% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan**

Angka Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan. Namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Timur mencatat, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Timur tahun 2024 mencapai 69,02 tumbuh 0,11 poin dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 68,91. Jika dibandingkan target RPD AHH tahun 2024 yaitu 68,52 tahun dengan realisasinya sebesar 69,02 tahun, maka capaian kinerjanya adalah 100,74% dan melebihi target yang telah ditetapkan. Angka Harapan Hidup 69,02 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024

memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 69,02 tahun.

Faktor pendorong tercapainya AHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit
  - b. Puskesmas Perawatan 1 unit
  - c. Puskesmas Non Perawatan 10 unit
  - d. Puskesmas Pembantu 68 unit
  - e. Pondok Bersalin Desa 55 unit
  - f. Pos Kesehatan Desa 12 unit
  - g. Posyandu 168 unit
  - h. Puskesmas Keliling (Roda 4) 26 unit
  - i. Rumah Dinas Dokter & Dokter Gigi 14 unit
  - j. Rumah Dinas Paramedis 25 unit
  - k. Kendaraan Dinas (Roda 4) 7 unit
  - l. Kendaraan Dinas (Roda 2) 207 unit
  - m. Instalasi Farmasi 1 unit
- Adapun faktor pendorong tercapainya dan terlampauiya pencapaian indikator tersebut adalah :
- Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan. Mendorong kerjasama antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan; memantapkan peran masyarakat dan pelaku pembangunan kesehatan; meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat; menerapkan promosi kesehatan yang efektif memanfaatkan agent of change setempat. Fokus dari strategi ini adalah sebagai berikut : a) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. b) Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). c) Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 16% sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. d) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana serta terjadinya wabah/KLB. e) Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating. f) Meningkatkan kerjasama lintas bidang dan lintas program, terutama dalam pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, pengawasan pangan dan budaya.

- Menambah Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan rawat inap bagi masyarakat Kecamatan dan di Desa yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan; memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal dan terpencil agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental, sosial) dan mengurangi angka kesakitan; menyediakan biaya operasional untuk Puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna. 37 Fokus dari strategi ini adalah sebagai berikut : a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambah Puskesmas, Poskesdes/Polindes di kecamatan dan di desa – desa, sehingga program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDG's dapat lebih cepat tercapai. b. Memfasilitasi sarana kesehatan lainnya seperti penerangan dengan pengadaan genset bagi fasyankes yang kurang/belum ada aliran listrik, kendaraan roda empat dan roda dua untuk Puskesmas Keliling juga untuk operasional puskesmas. c).Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan

membentuk jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lain-lain. d) Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan lainnya termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta. d. Menambah Jumlah Kompetensi SDM Kesehatan yang Merata dan Bermutu. Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, terutama di daerah tertinggal dan terpencil dan daerah bermasalah kesehatan; mengedepankan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memantapkan Sistem Mutu (upaya, pengawasan, audit), standarisasi dan sertifikasi, serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan diiringi dengan upaya menyejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Kesehatan.

Fokus dari strategi ini adalah sebagai berikut : a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambah Puskesmas, Poskesdes/Polindes di kecamatan dan di desa – desa, sehingga program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDG's dapat lebih cepat tercapai. b) Memfasilitasi sarana kesehatan lainnya seperti penerangan dengan pengadaan genset bagi fasyankes yang kurang/belum ada aliran listrik, kendaraan roda empat dan roda dua untuk Puskesmas Keliling juga untuk operasional puskesmas. c) Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lain-lain. d) Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan lainnya termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta. e)

Menambah Jumlah Kompetensi SDM Kesehatan yang Merata dan Bermutu. Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, terutama di daerah tertinggal dan terpencil dan

daerah bermasalah kesehatan; mengedepankan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memantapkan Sistem Mutu (upaya, pengawasan, audit), standarisasi dan sertifikasi, serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan diiringi dengan upaya menyejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Kesehatan. 38 Fokus dari strategi ini adalah sebagai berikut : a) Advokasi untuk peningkatan kesejahteraan dan perbaikan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal. b) Advokasi, sosialisasi dan implementasi penguatan peraturan perundang-undangan dalam aspek standarisasi, akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM Kesehatan. c) Peningkatan kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi. d) Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. e). Menambah Sumber – sumber Pembiayaan Kesehatan Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan dengan menjamin ketersediaan data Provincial Health Account (PHA) dan sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran; menghimpun sumber-sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran masyarakat, termasuk swasta untuk menjamin tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam menjalankan upaya preventif dan promotif dan terlaksananya program-program unggulan/prioritas di desa - desa, merancang dan menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal dan terpencil, serta daerah bermasalah kesehatan.

Fokus strategi ini adalah sebagai berikut : a) Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna. b) Mendorong tercapainya pembiayaan minimal sebesar 16 % dari APBD, di luar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. c) Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dalam optimalisasi peran Puskesmas.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran antara lain : 1. Bimbingan teknis manajemen asfiksia/BBLR dalam rangka Akselerasi Penurunan Angka Kematian Bayi. 2. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Neonatus.

9 Pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 % 112% Sangat Berhasil. 10 Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 100 % 139% Sangat Berhasil. 11 Pelayanan kesehatan orang usia 15 - 59 tahun sesuai standar 100 % 61% Cukup Berhasil. 12 Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun sesuai standar 100 % 82% Berhasil. 13 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar 100 % 51% kurang Berhasil. 14 Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar 100 % 50% kurang Berhasil. 15 Pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar 100 % 112% Sangat Berhasil. 16 Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar 100 % 88% Berhasil. 17 Pelayanan kesehatan orang terduga HIV sesuai standar 100 % 93% Sangat Berhasil.

Peningkatan kualitas program melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pemenuhan sarana prasarana di fasilitas kesehatan dan peningkatan sistem manajemen di fasilitas kesehatan. 4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan manajemen pelayanan Kesehatan yang sudah mulai dipahami oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas. 5. adanya pemantauan secara berkala dan periodik terhadap status gizi anak balita, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan yang tepat dan cermat Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran antara lain: 1. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman. 2. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal. 3. Rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melahirkan pada sarana kesehatan atau ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten dalam mengurangi resiko melahirkan. 4. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil yang masih kurang. 5. Masih kurangnya SDM di Puskesmas untuk melakukan penjangkauan kesehatan anak sekolah. 6. Sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas terkait Pelayanan kesehatan orang

produktif sesuai standar yang belum maksimal. 57 Strategi pemecahan masalah

1. Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas kesehatan dan peningkatan sistim manajemen di fasilitas kesehatan
2. Optimalisasi Poned dengan p eningkatan kualitas program melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3. Meningkatkan surveilans KIA;
4. Meningkatkan pelaksanaan kelas ibu; antenatal care terpadu (ANC terpadu) dan ANC terfokus;
5. Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas dan Pendidikan dan pelatihan teknis kepada tenaga kesehatan.
6. Pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
7. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK, Pengajian ibu-Ibu, Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu).
8. Kunjungan dan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya.
9. Pemberian makanan tambahan yang bersifat local untuk lebih meningkatkan status Gizi anak balita

Hasil evaluasi capaian Indikator kinerja yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, yaitu ; Indikator 13, Indikator 14, Indikator 15, Indikator 16, Indikator 17 mendapatkan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 78,8 % dengan predikat Tinggi (Berhasil). Walaupun terdapat 2 Indikator kinerja di bawah 60%, namun hal tersebut dapat tertutupi dari hasil capaian indikator kinerja lainnya.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran antara lain :

1. Pelatihan/OJT/penyegaran untuk tenaga kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan.
2. Adanya dukungan dana baik dari APBD maupun dari APBN (BOK/ DAK Non fisik kabupaten.
3. Adanya koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang terlibat.
4. Penjaringan kasus TB dan HIV dan KIE yang dilakukan secara terus- menerus oleh jajaran kesehatan yaitu Puskesmas dan didukung lintas sektor, kecamatan dan kelurahan.
5. Pelayanan ODGJ yang sudah baik dan secara maksimal di Fasilitas Kesehatan Dasar khususnya di Puskesmas

Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran antara lain :

1. Peran Lintas Sektor dan Lintas program belum optimal.
2. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil yang masih kurang.
3. Adanya peningkatan jumlah penderita TB dengan Multi Drug Resistant (MDR) yang sulit disembuhkan.
4. Dari seluruh penderita TB Paru yang diobati terdapat beberapa yang tidak berobat sampai sembuh dikarenakan beberapa hal, antara lain tidak melakukan folow up pada



akhir pengobatan, putus berobat di tengah “jalan”, gagal dalam pengobatan (kuman kebal obat), serta pindah ke luar daerah (propinsi lain) sebelum sembuh sehingga dimungkinkan masih ada menularan bagi masyarakat lainnya. 5. Pada pengobatan TB penemuan kasus tidak berjalan secara maksimal. 6. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular. 7. Pada umumnya pasien yang di skrining hanya berasal dari yang berobat ke Fasilitas Kesehatan dan pemeriksaan di posbindu terbatas hanya dengan orang-orang tertentu, Kurang nya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Deteksi Dini khususnya Hipertensi (Hanya memeriksakan saat kondisi sakit/Tertentu), Target capaian penderita hipertensi yang terlalu tinggi (berdasarkan data prevalensi hipertensi Riskesdas 2018 Kabupaten Barito sebesar 42,8 % dari jumlah 59 penduduk dan untuk tahun 2023 target capaian SPM Hipertensi menggunakan prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter sebesar 21,34%) 8. Terdapat beberapa Puskesmas yang belum mencapai target skrining dan BMHP untuk skrining DM ke masyarakat terbatas. Strategi pemecahan masalah 1. Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas dan Pendidikan dan pelatihan teknis kepada tenaga kesehatan. 2. Kunjungan dan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya 3. Peningkatan status gizi penderita TB. 4. Penerapan strategi DOTS (Directly Observed Treatment). 5. Peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik). 6. Optimalisasi PMO (Pengawasan Menelan Obat) dalam kepatuhan dan pengawasan minum obat penderita TB. 7. Penerapan kegiatan TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh) bagi penderita TB. 8. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan RS swasta maupun bidan praktek swasta terutama dalam hal pelaporan. 9. Melakukan promosi dan preventif masyarakat tentang orang dengan gangguan Penyakit Tidak Menular. 10. Melakukan Kuratif dan rehabilitatif bagi penderita gangguan Penyakit Tidak Menular. 11. Optimalisasi peran posbindu dalam melakukan pelayanan di masyarakat terutama Deteksi Dini PTM dan Memperluas sasaran skrining PTM ke sektor yang lain (Sekolah, kantor-kantor Pemerintah, dll) , Kemudian upaya pencatatan dan pelaporan yang lebih maksimal. 60 12. Optimalisasi skrining deteksi dini DM di fasilitas kesehatan/posbindu dan Menyediakan BMHP untuk menunjang skrining DM melalui Puskesmas-

puskesmas. Hasil evaluasi capaian Indikator kinerja yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu ; Indikator 4 dan Indikator 5 mendapatkan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil). Faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran antara lain: 1. Adanya regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2. Adanya regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 3. Pelatihan pendampingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 4. Pelatihan akreditasi puskesmas, bimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dan kabupaten/kota. 5. Peningkatan pembangunan sarana kesehatan tingkat pertama yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kota. 6. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 7. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis akreditasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk serta dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Timur mencatat, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Barito Timur tahun 2024 mencapai 9,54 , tumbuh 0,09 poin dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 9,45 yang berarti jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Jika dibandingkan target RPD RLS tahun 2024 yaitu 9,37 tahun dengan realisasinya sebesar 9,54 tahun, maka capaian kinerjanya adalah 101,82% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas

untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Timur mencatat, HLS anak dengan usia 7 tahun di Kabupaten Barito Timur tahun 2024 sebesar 12,88 tahun, tumbuh 0,01 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 12,87 tahun. Ini berarti rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,88 tahun atau hampir setara dengan Diploma I. Jika dibandingkan target RPD HLS tahun 2024 yaitu 12,87 tahun dengan realisasinya sebesar 12,88 tahun, maka capaian kinerjanya adalah 100,08% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu: 1. keterlibatan perempuan dalam parlemen, 2. perempuan sebagai tenaga profesional, manager dll serta 3. sumbangan pendapatan perempuan.

- Pentingnya IPG:
  - IPG menjadi tolok ukur penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pembangunan manusia yang inklusif.
  - IPG membantu mengidentifikasi ketimpangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia.
- Perbandingan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG):
  - IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
  - Sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

IPG Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 di angka 89,20 , sedangkan untuk tahun 2024 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur. Jika melihat perbandingan pada tahun 2022 untuk IPG Kabupaten Barito Timur

89,04 mengalami kenaikan sebesar 0,16.

### **Tujuan 3: Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**

#### Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah alat ukur untuk menilai kualitas infrastruktur suatu wilayah. Indeks ini bisa digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan infrastruktur dan menyusun rekomendasi perbaikannya.

#### Komponen Indeks Infrastruktur

- Penyediaan jalan dan jembatan
- Penyediaan transportasi
- Penyediaan infrastruktur air bersih
- Penyediaan infrastruktur drainase
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon

#### Manfaat Indeks Infrastruktur

- Mengetahui keberhasilan penyediaan atau pembangunan infrastruktur
- Menyusun rekomendasi perbaikan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur
- Menilai kinerja kota atau kabupaten
- Menilai tingkat pembangunan di suatu kota

### **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur**

Kualitas infrastruktur dapat diukur dari beberapa komponen, seperti ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan.

#### Komponen infrastruktur :

- Ketersediaan listrik
- Akses air bersih
- Kualitas jalan dan transportasi
- Akses fasilitas kesehatan dan pendidikan
- Sistem transportasi

- Kemajuan teknologi
- Utilitas publik

Indikator infrastruktur :

- Indeks infrastruktur digunakan untuk menghitung pembangunan suatu negara
- Indikator infrastruktur menjelaskan pentingnya infrastruktur fisik bagi perekonomian
- Indikator infrastruktur mengkaji komitmen suatu wilayah terhadap investasi dalam infrastruktur

Indeks kepuasan layanan infrastruktur

- Indeks kepuasan layanan infrastruktur mengukur kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur
- Indeks kepuasan layanan infrastruktur mengukur kepuasan masyarakat terhadap manfaat infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur

- Peningkatan kualitas infrastruktur dapat dilakukan dengan melakukan pemeliharaan preventif yang strategis
- Peningkatan kualitas infrastruktur dapat dilakukan dengan berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dan manajemen pengetahuan

Dampak peningkatan infrastruktur Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peningkatan infrastruktur dapat mengurangi pengangguran, Peningkatan infrastruktur dapat mengentaskan kemiskinan.

- Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih  
Akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan suatu rumah tangga. Air bersih tidak hanya penting untuk kebutuhan dasar sehari-hari seperti memasak, minum, dan mandi, tetapi juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit yang ditularkan melalui air. Rumah tangga yang terakses

air bersih cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Di berbagai daerah di Indonesia, upaya peningkatan akses air bersih telah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, seperti jaringan perpipaan dan sumur bor, serta program edukasi tentang pentingnya sanitasi dan pengelolaan sumber daya air. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya, geografis yang sulit, serta faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan semua rumah tangga di Indonesia dapat menikmati akses air bersih yang memadai.

Air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air bersih dapat dikonsumsi atau digunakan untuk memasak, mencuci, dan sanitasi. Ciri-ciri air bersih Jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi manusia Tidak mengandung bakteri atau mikroorganisme yang bisa membahayakan kesehatan manusia suhu air kira-kira sama dengan suhu ruang tidak mengandung zat kimia berlebih memiliki pH netral. Manfaat air bersih :

- Menjaga kesehatan.
- Membantu menciptakan masyarakat tangguh yang hidup di lingkungan yang sehat
- Membantu terhindar dari berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, cacaran, penyakit kulit hingga keracunan.

Cara mendapatkan air bersih :

- Membeli air bersih dalam tangki, jerigen, galon, dan lain-lain.
- Langganan air bersih dari PDAM.
- Mendapatkan air bersih secara gratis dari mata air, sumur, dan lain-lain.

Peran pemerintah dalam air bersih adalah menyediakan infrastruktur, menjamin kualitas air, dan menggalakkan edukasi.

- Penyediaan infrastruktur  
Membangun sumur bor, jaringan perpipaan, dan instalasi pengolahan air
- Membangun sarana dan prasarana sanitasi

Melaksanakan program peningkatan sanitasi dan air minum seperti SANIMAS dan PAMSIMAS

- Menjamin kualitas air  
Menjamin kualitas air yang digunakan oleh masyarakat
- Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan industri
- Membuat kebijakan terkait pengendalian pencemaran air
- Menggalakkan edukasi  
Menggalakkan kampanye edukasi tentang pentingnya sanitasi dan higiene. Membina masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat aset air bersih secara bersama-sama
- Penyediaan subsidi Memberikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan air bersih bagi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik.

Perubahan iklim berdampak nyata pada kehidupan manusia sehingga tantangan terhadap kebutuhan air ke depannya akan semakin meningkat.

- Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh  
Kawasan perumahan kumuh merupakan masalah yang dihadapi banyak kota besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Luas kawasan perumahan kumuh sering kali sulit untuk ditentukan dengan angka pasti karena berbagai faktor, seperti definisi yang berbeda-beda tentang apa yang dianggap sebagai "kumuh" serta perubahan yang terus-menerus terjadi di area tersebut. Namun, secara umum, kawasan kumuh dikenal dengan kondisi infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang tidak teraspal, sistem sanitasi yang tidak memadai, dan bangunan yang tidak kokoh. Di Indonesia, upaya untuk mengurangi luas kawasan kumuh dilakukan melalui berbagai program pemerintah, seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, diharapkan masalah kawasan kumuh dapat diatasi secara bertahap.

Perumahan kumuh, atau slum, adalah permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, seringkali ditandai dengan kepadatan tinggi,

bangunan semi-permanen, dan kurangnya infrastruktur dasar.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang perumahan kumuh:

Definisi:

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Karakteristik:

Kepadatan Tinggi: Bangunan berdiri rapat, seringkali tanpa perencanaan yang baik.

Kualitas Bangunan Buruk: Bahan bangunan seringkali semi-permanen dan tidak tahan lama.

Kurangnya Infrastruktur Dasar: Jalan lingkungan tidak teraspal, drainase buruk, dan akses air bersih terbatas.

Lingkungan Kotor: Sampah menumpuk, limbah mengalir sembarangan, dan pencemaran lingkungan tinggi.

Masalah Sosial: Tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, serta potensi kriminalitas.

Penyebab:

Pertumbuhan Penduduk Cepat: Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan rumah layak huni.

Kemiskinan: Masyarakat dengan pendapatan rendah tidak mampu membangun rumah yang layak.

Penyediaan Rumah yang Tidak Terjangkau: Harga rumah yang mahal dan sulitnya mendapatkan kredit perumahan.

Kurangnya Perencanaan Kota: Perencanaan kota yang buruk dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dampak:

Masalah Kesehatan: Penyakit menular mudah menyebar karena kondisi lingkungan yang buruk.

Masalah Lingkungan: Pencemaran air, udara, dan tanah.

Masalah Sosial: Tingkat kriminalitas tinggi, pengangguran, dan kemiskinan.



Masalah Ekonomi: Kurangnya produktivitas karena lingkungan yang tidak kondusif.

Upaya Penanganan:

Peningkatan Kualitas Bangunan: Rehabilitasi dan renovasi bangunan yang ada.

Penyediaan Infrastruktur Dasar: Pembangunan jalan, drainase, dan akses air bersih.

Penataan Ruang: Perencanaan kota yang baik dan terpadu.

Pemberdayaan Masyarakat: Pemberian bantuan ekonomi dan keterampilan kepada masyarakat.

Pencegahan: Melalui regulasi dan perencanaan yang baik, mencegah munculnya perumahan kumuh baru.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kawasan perumahan kumuh untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. Salah satu tanggung jawab utama adalah menyediakan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi yang layak, dan listrik. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya akses yang memadai ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta fasilitas umum lainnya. Program peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan harus diimplementasikan, termasuk renovasi bangunan dan perbaikan jalan. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek perbaikan untuk memastikan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pendanaan dan sumber daya tambahan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kondisi fisik kawasan kumuh tetapi juga memberdayakan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif

- Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)

Rasio elektrifikasi adalah indikator penting yang menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke listrik di suatu wilayah. Rasio ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat perkembangan infrastruktur energi suatu daerah, yang berpengaruh langsung terhadap

kualitas hidup masyarakat. Elektrifikasi yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga yang dapat menikmati manfaat dari listrik, seperti pencahayaan, alat elektronik, dan akses informasi. Pemerintah sering kali menetapkan target rasio elektrifikasi sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Meski banyak negara berkembang yang masih berjuang untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, berbagai inisiatif dan program, seperti penggunaan energi terbarukan dan pembangunan jaringan listrik yang lebih luas, terus diupayakan untuk mencapai akses listrik yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kementerian ESDM menargetkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik mencapai 100% pada tahun 2024. Pentingnya Rasio Elektrifikasi akses listrik yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses listrik dapat memberikan kesempatan bagi penerimanya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian. Peran Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Langkah yang dilakukan pertama adalah mengidentifikasi daerah yang belum terjangkau. Pemerintah juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan melakukan identifikasi-identifikasi kembali terkait daerah-daerah yang tidak terjangkau.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Potensi Kelestarian Sumber Daya Alam**

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia disuatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting.

Pengukuran lingkungan hidup adalah proses pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk udara, air, tanah, dan makhluk hidup. Pengukuran lingkungan hidup sangat penting untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan untuk memperbaiki kualitas hidup kita.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup yang perlu diketahui.

### 1. Faktor Bencana Alam

Adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus yang terjadi dalam suatu lingkungan dapat berperan besar bagi kualitas lingkungan hidup.

### 2. Faktor Perilaku Manusia

Perilaku manusia juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Contohnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan, tradisi yang dianut masyarakat, hingga cara berpikir masyarakat.

### 3. Faktor Tingkat Kesuburan Tanah

Tingkat kesuburan tanah dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lingkungan. Jika kesuburan tanah cukup baik, maka kualitas lingkungan juga akan ikut membaik. Begitu pula sebaliknya.

### 4. Faktor Iklim

Iklim juga dapat memengaruhi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah, atau bahkan dalam skala besar di beberapa wilayah. Misalnya, iklim di negara tropis sangat cocok untuk menanam tanaman.

### 5. Faktor Perubahan Cuaca

Perubahan cuaca yang terjadi dapat mengubah kondisi lingkungan hidup menjadi lebih buruk. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup komponen alam yang ada di dalamnya, baik tanaman, hewan, maupun manusia.

Air merupakan sumber kehidupan, maka dari itu kualitas air tersebut wajib dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Secara umum sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dikategorikan atas 2 kelompok, yaitu:

Sumber air permukaan, yang dapat diperoleh dari sungai, danau, embung, telaga dan tidak termasuk air laut. Air tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari – hari seperti air minum, MCK, kebutuhan bidang pertanian

Sumber air tanah, dimanfaatkan melalui proses penggalian atau pengeboran. Pemanfaatan air ini biasanya hanya untuk rumah tangga

Sumber – sumber air tersebut tentunya wajib dijaga kualitasnya, termasuk kualitas air sungai dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung sungai. Pembukaan Lahan Pertambangan dan Perkebunan Sawit yang semakin pesat di berbagai wilayah di Kabupaten Barito Timur mendorong banyaknya penggunaan lahan di sepanjang aliran sungai. Perubahan fungsi ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas air yang mengalir sepanjang sungai tersebut. Sementara penyediaan Air Baku untuk PDAM di Kabupaten Barito Timur semua bergantung pada Air Sungai.

Air merupakan unsur lingkungan yang esensial bagi keberlanjutan kehidupan banyak individu, bahkan oleh seluruh organisme hidup yang menghuni planet ini. Ketersediaan sumber daya air secara kuantitas dan kualitas sangat penting untuk mendukung kelestarian lingkungan dan Kesehatan masyarakat. Sumber air berasal dari akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara (1). Upaya dalam melakukan monitoring kualitas air sungai, danau adalah ditentukan penghitungan IKA. Hal ini menjadi salah satu komponen dalam menentukan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di suatu wilayah. Sungai adalah jalur pengaliran air baik alami maupun buatan dari hulu hingga hilir yang dibatasi sempadan sungai di kanan kirinya (2).

Sungai memiliki peran yang penting bagi kehidupan dan kualitasnya dipengaruhi oleh kegiatan manusia baik di sektor industri maupun rumah tangga. Pertumbuhan populasi yang cepat dan tingkat ketidakpedulian terhadap lingkungan dalam aktivitas masyarakat dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, terutama pada perairan sungai. Berbagai faktor telah terbukti mempengaruhi kualitas air sungai, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh penduduk di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)(3). Penurunan kualitas air dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti aktivitas industri, kegiatan domestik, dan kegiatan lainnya yang memiliki dampak negatif terhadap sungai (4).

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter.

Berdasarkan Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 61 titik pengamatan di 33 sungai di lokasi hulu maupun hilir. Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2023 adalah 54 sedangkan pada tahun 2024 54,71 target RPD 59,70 , sehingga capaian kinerja 91,64%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 . Hal ini menunjukkan kualitas air semakin buruk. Jika IKA Sungai kurang , maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang banyak menderita diare, disentri, dan iritasi kulit.

IKA sungai hendaknya dipertahankan untuk menjaga kualitas air agar memenuhi standar kesehatan dan ekosistem seimbang. Pemerintah, industri dan masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian pencemaran air. Kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal dan perilaku hidup bersih, sehat di masyarakat sangat mendukung meningkatnya kesehatan masyarakat.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup.

IKU sebagai tolak ukur yang berkisar antara 0 hingga 500. Semakin tinggi nilai IKU, semakin besar tingkat polusi udara dan semakin besar pula masalah kesehatan. Misalnya, nilai IKU 50 atau lebih rendah menunjukkan kualitas udara yang baik, sedangkan nilai IKU di atas 300 menunjukkan kualitas udara berbahaya.

Untuk setiap polutan, nilai IKU sebesar 100 umumnya sesuai dengan konsentrasi udara ambien yang setara dengan tingkat standar kualitas udara ambien nasional jangka pendek untuk perlindungan kesehatan masyarakat. Nilai IKU yang berada pada atau di bawah 100 umumnya dianggap memuaskan. Ketika nilai IKU berada di atas 100, kualitas udara menjadi tidak sehat: mula-mula untuk kelompok masyarakat tertentu yang sensitif, kemudian untuk semua orang ketika nilai IKU semakin tinggi.

IKU dibagi menjadi enam kategori. Setiap kategori berhubungan dengan tingkat masalah kesehatan yang berbeda. Setiap kategori juga memiliki warna tertentu. Warnanya memudahkan masyarakat untuk dengan cepat menentukan apakah kualitas udara mencapai tingkat tidak sehat di komunitasnya.

Kualitas udara yang baik menjadi kebutuhan vital yang wajib ada di lingkungan dan sudah menjadi kewajiban masyarakat juga untuk menjaganya. Standar kualitas terbaik dari udara mengacu pada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang mana kita pasti sudah familiar dengan istilah tersebut.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Skor IKTL biasanya

ditunjukkan dalam bentuk skala yang menunjukkan tingkat kualitas penutupan lahan, dengan skor tertinggi menunjukkan lahan yang paling baik dan stabil. IKTL berguna untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menilai dan memantau kualitas tutupan lahan dan membuat tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kualitas lahan yang buruk.

UU 41/1999 : mempertahankan kecukupan kawasan hutan dan penutupannya minimal 30% (artinya cukup). Dalam perhitungan IKTL dengan tutupan hutan 30% nilai IKTL nya 50 (dalam kategori IKLH nilai 50 kondisinya sangat kurang)

#### **Tujuan 4 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik**

##### Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sistem penilaian dan pemantauan untuk mengukur kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. IRB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan IRB Memantau kemajuan reformasi birokrasi, Mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Tujuan Evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun 2023 adalah 61,14 dengan kategori B. Sedangkan untuk tahun 2024 belum keluar hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah**

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Timur, dilihat dari sisi akuntabilitas masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk membawa masyarakat Kabupaten Barito Timur arah yang lebih maju.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta kabupaten/kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005-2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028.

Dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, terutama dengan adanya berbagai perubahan kebijakan maupun kebijakan baru Pemerintah Pusat serta kondisi Indonesia saat ini yang juga sangat berpengaruh pada pembangunan Kabupaten Barito Timur, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan rencana pembangunan, maka Perubahan RPJMD ini diikuti dengan



perubahan seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 Rencana pembangunan menjadi tolok ukur bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan tidak hanya kinerja keluaran (output), namun berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact). Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Dari hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun 2023 Nilai Hasil Evaluasi 57,96 Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC. Tahun 2024 Nilai Hasil Evaluasi 60,81 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B target RPD B. Dari segi Tingkat Akuntabilitas Kinerja mengalami kenaikan 2,85. Hal tersebut menunjukkan nilai implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya unit kerja.

Opini WTP adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas disajikan secara wajar. WTP merupakan singkatan dari "Wajar Tanpa Pengecualian".

Ciri-ciri opini WTP

- Laporan keuangan yang diperiksa menyajikan informasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Laporan keuangan bebas dari salah saji material
- Laporan keuangan memberikan informasi yang bebas dari salah
- Saji material dalam semua hal yang material

Manfaat opini WTP

- Menunjukkan bahwa roda pemerintahan dikelola secara akuntabel
- Menandakan bahwa kementerian atau lembaga terbebas dari korupsi
- Memperkuat kepercayaan publik
- Dasar penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN

Jenis opini audit BPK Wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak wajar (adversed opinion), Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion).

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri. Dalam menjalankan tugasnya BPK RI didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam ruang lingkup pemeriksaan, BPK RI memiliki kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundan-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur Barito Timur dalam perjalanannya semenjak dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI berkaitan dengan pemeriksaan keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel**

<b>Jenis Pemeriksaan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
Laporan Keuangan	2016	WTP
Laporan Keuangan	2017	WTP
Laporan Keuangan	2018	WTP
Laporan Keuangan	2019	WTP
Laporan Keuangan	2020	WTP
Laporan Keuangan	2021	WTP
Laporan Keuangan	2022	WTP
Laporan Keuangan	2023	WTP

Dari segi pengelolaan keuangan penggunaan sistem informasi menjadi salah satu faktor penunjang perolehan capaian opini yang baik. Hal tersebut dikarenakan sistem dapat membantu para pengelola keuangan di Perangkat Daerah dalam melaksanakan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dari BPKP sebagai sistem informasi yang membantu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Semenjak tahun 2021 Kemendagri merilis aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan yang baru.

Selain sistem informasi, pembinaan pengelola keuangan menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik dan berefek kepada capaian opini. Para aktor pengelola keuangan diberikan pelatihan terkait kebijakan-kebijakan teknis dan pemahaman pengelolaan keuangan.

Salah satu hal yang mendasar menjadi faktor capaian opini yang baik yaitu adanya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Penyusunan kebijakan dilihat dari amanat peraturan-peraturan atau undang-undang dari Pemerintah Pusat yang perlu diterjemahkan kedalam kebijakan teknis yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan

Dari data yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur bahwa Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2023 adalah B , untuk tahun 2024 masih belum ada opini karena menunggu hasil Pemeriksaan Terperinci BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang diperkirakan hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada bulan Mei 2024 akan datang.

### **Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik (IKM)**

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelayanan publik dapat dikatakan baik apabila mampu memenuhi kriteria, seperti memiliki fasilitas, pelayanan tepat waktu, membantu konsumen, bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan, memiliki ketrampilan dalam memberikan pelayanan , perilaku ramah.

Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan sebuah instansi atau perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang diterima masyarakat. Dari data hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barito Timur tahun 2024 pada angka 3,32 dengan capaian kinerja 92,48% dengan Nilai Baik.

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Hal tersebut sesuai dengan aturan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Pematang Karau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Tamiang Layang, Puskesmas Edison Jaar, Puskesmas Telang Siong, Puskesmas Pasar Panas, Puskesmas Hayaping, Puskesmas Bentot, Puskesmas Dayu, Puskesmas Tampa, Puskesmas Ampah, Puskesmas Unsum dan Puskesmas Bambulung. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat tersebut. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Nilai SKM Kabupaten Barito Timur tahun 2024 memperoleh angka rata-rata sebesar **3,32** angka ini menggambarkan level kepuasan layanan secara umum mendapatkan predikat "**BAIK**"

Survey Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 16 (Enam Belas) unit pelayanan publik, yang berguna untuk mengevaluasi pelayanan yang ada untuk kemudian diperbaiki dan ditingkatkan. Beberapa poin yang dapat diambil dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yaitu :

- Nilai SKM tahun 2024 adalah sebesar **3,32** dengan kategori "Baik";
- Unit pelayanan publik yang terdiri dari 16 (Enam Belas) instansi mendapatkan predikat "Baik";

Setelah adanya kesimpulan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan nilai indeks **3,32** dengan predikat "**Baik**", masih banyak harapan dari responden sebagai pengguna layanan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dikemudian hari. Adapun saran dari hasil Survey

Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Setiap unit layanan publik perlu meningkatkan kualitas layanan terutama unsur penanganan, pengaduan, sarana dan masukan mengingat penilaian unsur tersebut lebih kecil dibandingkan dengan unsur pelayanan lainnya;
- Setiap Unit Pelayanan Publik diharapkan menampilkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang dimiliki kepada semua pengguna layanan;
- Meningkatkan pelatihan bagi petugas pelayanan guna meningkatkan kompetensi petugas;
- Menyediakan layanan secara online untuk kemudahan masyarakat

**d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam RPD dapat dilihat pada Tabel 2.8

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan**  
**Target RPD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Akhir RPD	Realisasi	Capaian Kinerja
1	<b>Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.</b>	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,28	4,29	106,98
		b. Angka Kemiskinan	5,38	5,32	6,66	80,78
	1.1 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Unggul Daerah	Laju PDRB Sektor Unggulan	3,56	4,31	38,11	1070,51%
	1.2 Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Daerah	PAD Sektor Pariwisata	200.000.000,-	250.000.000,-	2.903.760.060,50	1.451,88%
	1.3 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	0,3	0,22	0,299	99,66
2	<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	a. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	53,8 M	65 M	482.781.020,00	0,502%
		b. Nilai Investasi Berskala Internasional (PMA)	3900 US\$	4810 US\$	123.796,88 US\$	0,004126%
	2.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,52	68,54	69,02	100,74
	2.2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	a. Rata-Rata Lama Sekolah	9,37	9,42	9,54	101,82
		b. Harapan Lama Sekolah	12,87	12,91	12,88	100,08
	2.3 Meningkatkan Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85	86,05	N/a	N/a
3	<b>Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan</b>	Indeks Infrastruktur	52	54	57,57	71,40
	3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	80,63	82,42	57,57	71,40

	3.2 Meningkatnya Potensi Kelstarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	70,76	66,66	96,95 %
<b>4</b>	<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B
	4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Predikat SAKIP	B	B	B	B
		b. Opini BPK	WTP	WTP	-	-
	4.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,59	3,59	3,32	92,48%

### **Tujuan 1 : Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.**

#### **a. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Capaian Kinerja Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,29 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 4,28, berarti capaian kinerja mengalami kenaikan dari target RPD.

#### **b. Angka Kemiskinan**

Capaian Kinerja Tahun 2024 Angka Kemiskinan sebesar 6,66 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 5,32, berarti capaian kinerja mengalami kenaikan target RPD.

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggul Daerah**

#### **Laju PDRB Sektor Unggulan**

Capaian Kinerja Tahun 2024 Laju PDRB Sektor Unggulan sebesar 38,11 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 4,31, berarti capaian kinerja mengalami kenaikan target RPD.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah**

#### **PAD Sektor Pariwisata**

Capaian Kinerja Tahun 2024 PAD Sektor Pariwisata sebesar 2.903.760.060,50 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 250.000.000,-, berarti capaian kinerja mengalami kenaikan target RPD.



### **Sasaran 3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Gini Ratio

Capaian Kinerja Tahun 2024 Gini Ratio sebesar 0,299 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 0,22, berarti capaian kinerja mengalami kenaikan target RPD.

### **Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah**

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)

Capaian Kinerja Tahun 2024 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) sebesar 482.781.020,00 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 65 M, berarti capaian kinerja belum mencapai target RPD.

Nilai Investasi Berskala Internasional (PMA)

Capaian Kinerja Tahun 2024 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) sebesar 123.796,88 US\$ jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 4810 US\$, berarti capaian kinerja melebihi mencapai target RPD.

### **Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Kinerja Tahun 2024 Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,81 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 74,48, berarti capaian kinerja melebihi mencapai target RPD.

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan**

Angka Harapan Hidup

Capaian Kinerja Tahun 2024 Angka Harapan Hidup sebesar 69,02 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 68,54, berarti capaian kinerja melebihi mencapai target RPD.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian Kinerja Tahun 2024 Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 9,54 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 9,42, berarti capaian kinerja melebihi mencapai target RPD.

Harapan Lama Sekolah

Capaian Kinerja Tahun 2024 Harapan Lama Sekolah sebesar 12,88 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 12,91, berarti capaian kinerja belum mencapai target RPD.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan**

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian Kinerja Tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 0 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 86,05, berarti capaian kinerja belum rilis dari BPS sehingga belum terlihat hasil capaian.

### **Tujuan 3 : Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**

Indeks Infrastruktur

Capaian Kinerja Tahun 2024 Indeks Infrastruktur sebesar 57,57 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 54, berarti capaian kinerja melebihi mencapai target RPD

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur**

Indeks Infrastruktur

Capaian Kinerja Tahun 2024 Indeks Infrastruktur sebesar 57,57 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 82,42, berarti capaian kinerja belum mencapai target RPD

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Potensi Kelestarian Sumber Daya Alam**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,66 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 70,76, berarti capaian kinerja belum mencapai target RPD

### **Tujuan 4 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik**

Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Kinerja Tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar B jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar B, berarti capaian kinerja sudah mencapai target RPD

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah**

Predikat SAKIP

Capaian Kinerja Tahun 2024 Predikat SAKIP sebesar B jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar B, berarti capaian kinerja sudah mencapai target RPD

Opini BPK

Capaian Kinerja Tahun 2024 Opini BPK sebesar 0 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar WTP, berarti capaian kinerja belum keluar hasil dari BPK sehingga belum mencapai target RPD

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,32 jika dibandingkan dengan Target RPD sebesar 3,59, berarti capaian kinerja belum mencapai target RPD

#### e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

### Tujuan 1 : Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan perluasan Lapangan Pekerjaan

#### Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2.22.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.647.356.573	6.111.426.613	92
2	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	142.282.000	133.128.424	99
3	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	675.002.740	675.002.740	100
4	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	20.022.000	8.590.000	75
5	2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	29.983.300	29.983.300	79
6	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	461.743.580	446.871.580	100
7	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	351.445.110	328.775.631	100
8	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	89.863.200	71.009.080	82
Jumlah		5.470.806.554	5.074.915.874	93

#### Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Program Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota	19.999.700	19.999.700	100
2	Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	9.999.800	9.999.800	100
3	Program Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	323.221.968	323.221.968	100

	kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
<b>JUMLAH</b>		<b>353.221.468</b>	<b>353.221.468</b>	

## **Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan**

<b>No</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	81.595.284.220	74.666.777.467	91,51
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.438.529.684	41.672.127.346	87,90
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia kesehatan	577.565.005	561.655.369	97,25
4.	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan makanan minuman	445.200.050	336.655.992	75,62
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	474.026.710	384.386.573	81,09
<b>JUMLAH</b>		<b>129.530.605.669</b>	<b>117.621.602.747,18</b>	<b>90,81</b>

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	227.211.885.487	219.528.733.324	96,62
2	Program Pengelolaan Pendidikan	42.113.010.415	40.066.561.231	95,14
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63.396.100	60.115.000	94,82
4	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	12.629.900	5.475.000	43,32
<b>Jumlah</b>		<b>269.400.921.902</b>	<b>259.660.884.555</b>	<b>96,38</b>

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender Dalam Pembangunan**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.863.547.973	4.551.459.289	93,58
2	Program Pengarusutamaan	186.809.500	186.790.800	99,99

	Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			
3	Program Perlindungan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	121.000.425	119.250.325	98,55
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	192.192.475	189.172.875	98,43
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	20.995.000	20.795.100	99,05
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	125.880.870	122.464.656	98,1
7	Program Perlindungan Khusus Anak	35.000.000	35.000.000	100
8	Program Pengendalian Penduduk	228.048.999	227.449.417	99,74
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.744.994.050	1.689.191.795	98,99
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.102.097.340	2,100,088.340	99,9
<b>JUMLAH</b>		<b>9.620.566.632</b>	<b>9.241.662.597</b>	<b>96,06</b>

### Tujuan 3: Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

#### Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.822.202,00	3.793.827.568,66	99,09
2	Program Penyelenggaraan Jalan	122.878.849.124,00	110.656.207.990,60	90,05
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.290.725.573,00	3.174.400.225,00	96,47
4	Program Kawasan Permukiman	722.168.900,00	712.539.981,00	98,67
<b>Jumlah</b>		<b>126.895.565.799,0</b>	<b>118.336.975.765,26</b>	<b>93,255</b>

#### Sasaran 2 : Meningkatnya Potensi Kelestarian Sumber Daya Alam

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.136.379,99	8.951.725.755	97,98
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	293.366.900	278.060.160	94,78
3	Program Pengendalian Pencemaran	237.765.500	231.138.400	97,21

	Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	325.159.535	309.392.800	98,46
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35.368.800	34.824.800	98,46
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	43.173.900	41.354.000	95,78
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	22.081.700	21.639.000	98,00
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.115.600	18.471.000	91,82
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	0	0
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	38.162.550	23.240.000	60,90
11	Program Pengelolaan Persampahan	1.830.918.700	1.827.095.844	99,79
<b>JUMLAH</b>		<b>2.855.249.564,99</b>	<b>11.736.941.759,00</b>	

#### **Tujuan 4 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik**

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.051.693.377,01	26.073.615.498,75	<b>78,89</b>
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	203.522.593.088,00	189.021.194.432,00	<b>92,87</b>
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK	3,277.126.500,00	2.976.319.087,00	<b>90,82</b>

	DAERAH			
	<b>JUMLAH</b>	<b>239.851.412.965,01</b>	<b>218.071.129.017,75</b>	<b>90,91</b>

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.075.460,00	73.558.344,00	<b>95,44</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>77.075.460,00</b>	<b>73.558.344,00</b>	

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik (IKM)

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.877.660,00	79.618.710,00	<b>98,44</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>80.877.660,00</b>	<b>79.618.710,00</b>	

**f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.**

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 menganggarkan jumlah pendapatan sebesar **Rp. 1.188.134.362.900,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 1.147.129.218.345,02 (96,55)** dan anggaran belanja daerah sebesar **Rp. 1.317.413.770.394,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 1.170.145.080.544,25 (88,82)**

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 adalah tersaji sebagai berikut :

**Tabel 2.13**

**Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN	1.188.134.362.900,-	1.147.129.218.345,02	96,55
II.	BELANJA	Rp. 1.317.413.770.394,-	1.170.145.080.544,25	88,82

*Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur data sementara*

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /Kota dari Kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.**

Untuk Tahun 2024 Tidak Ada Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /Kota dari Kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

#### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /Kota dari Provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.**

Tahun 2024 Tidak Ada Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /Kota dari Provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

#### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Karena tidak adanya Tugas pembantuan Tahun 2024 yang diberikan baik dari Pusat maupun Provinsi maka masyarakat Kabupaten Barito Timur tidak dapat merasakan bantuan tersebut.

#### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Semoga ditahun berikutnya Kabupaten Barito Timur bisa mendapatkan Tugas Pembantuan diberikan baik dari Pusat maupun dari Provinsi.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Pendidikan

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal memuat :

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Timur secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

##### No      Jenis Pelayanan Dasar

- 1      Pendidikan Anak Usia Dini
- 2      Pendidikan Dasar
- 3      Pendidikan Kesenjangan

##### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2.553		2.553	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100		100	100%
	2. Angka partisipasi murni	%	100		100	100%

	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	59,26		59,26	100%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	58,33		58,33	100%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	20		20	100%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	104		104	100%
	7. Indeks distribusi guru	%	0		0	0
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	264		264	100%
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	264		264	100%
2	<b>Pendidikan Dasar</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	14.145		14.145	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	<b>SD</b>					100%
	1. Angka partisipasi kasar	%	100		100	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100		100	100%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	54.91		54.91	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	39.99		39.99	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	3.39		3.39	100%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	22.46		22.46	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	76.87		76.87	100%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.92		73.92	100%

	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.96		61.96	100%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	99		99	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	1		1	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	1184		1184	100%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	1184		1184	100%
	<b>SMP</b>					100%
	1. Angka partisipasi kasar	%	100		100	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100		100	100%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	70.05		70.05	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	68.77		68.77	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	3.14		3.14	100%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	9.78		9.78	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74.64		74.64	100%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.44		72.44	100%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62		62	100%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	96		96	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	1		1	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	423		423	100%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	423		423	100%
3	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	146		146	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu</i>					<b>20,00%</b>

	<i>Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
1.	Angka partisipasi kasar	%	100		100	100%
2.	Angka partisipasi sekolah	%	100		100	100%
3.	Kemampuan literasi	Nilai	0		0	100%
4.	Kemampuan numerasi	Nilai	0		0	100%
5.	Perbedaan skor literasi	Nilai	0		0	100%
6.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0		0	100%
7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	0		0	100%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0		0	100%
9.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0		0	100%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	0		0	100%
11.	Indeks distribusi guru	%	0		0	100%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	0		0	100%
13.	Proporsi PTK penggerak*	%			0	100%

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan untuk anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp. 200.000.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 292.097.260
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 28.179.080
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 124.702.550
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Rp. 139.552.800
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp. 9.764.349.858

		Peningkatan kapasitas pengelolaan dan BOS Sekolah Dasar	Rp. 345.658.100
		Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp. 51.061.715
		Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Rp. 80.348.680
		Pelatihan penggunaan aplikasi bidang Pendidikan	Rp. 80.572.280
		Koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 30.275.000
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Rp. 69.477.550
		Fasilitasi komunikasi belajar Pendidikan dan tenaga kependidikan	Rp. 48.539.765
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi	Rp. 49.999.650
		Pengadaan perlengkapan peserta didik	Rp. 196.142.600
		Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Rp. 6.387.875.671
		Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan	Rp. 145.839.630
		Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Rp. 191.737.100
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rp. 4.663.949.316
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 4.204.014.000
		Rehabilitasi Seding/Berat sarana, prasarana utilitas sekolah	Rp. 3.402.411.740
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 444.520.330
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP	Rp. 25.147.750
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP	Rp. 76.120.750
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Rp. 92.592.000
		Pengelolaan dana BOS SMP	Rp. 5.259.330.000
		Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp. 27.067.050
		Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Rp. 27.067.050
		Pelatihan penggunaan aplikasi bidang Pendidikan	Rp. 26.927.050
		Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 29.999.950
		Fasilitasi komunikasi belajar Pendidikan dan tenaga kependidikan	Rp. 199.384.445
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk mencegah	Rp. 44.061.500

		perundungan, kekerasan dan intoleransi	
		Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Rp. 221.015.475
		Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan	Rp. 20.984.820
		Pengadaan perlengkapan peserta didik	Rp. 131.999.850
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp. 1.075.400.455
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp. 618.237.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp. 141.953.955
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 9.999.900
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp. 2.004.799.810
		Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp. 101.143.785
		Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Rp. 46.144.200
		Pelatihan penggunaan aplikasi bidang Pendidikan	Rp. 49.390.150
		Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 26.373.100
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Rp. 52.641.260
		Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan	Rp. 61.322.160
		Pengelolaan Dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	Rp. 789.400.000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 13.003.000
Proram pendidikan dan tenaga kependidikan			Rp. 63.396.100
Program pengendalian perijinan pendidikan			Rp. 12.829.900
	<b>Total</b>		<b>Rp. 42.189.036.900</b>

#### 4.1.3 Realisasi

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan yaitu :

	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan</i>		Jumlah total yang	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>

	<b>(80%)</b>		harus dilayani			
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2.553	2.553	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>13,21%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	83,89	16,11	89,89%
	2. Angka partisipasi murni	%	100	83,89	16,11	89,89%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	59,26	58,53	0,73	98,77%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	58,33	58,33	0	100%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	20	11	9	55,00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	104	61	43	58,65%
	7. Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	264	37	227	14,02%
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	264	1	263	0,38%
2	<b>Pendidikan Dasar</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	14.145	14.145	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>17,33%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	<b>SD</b>					88,20%
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	97.17	2.83	97,17%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	97.17	2.83	97,17%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	54.91	71.28	-16.37	100%

4.	Kemampuan numerasi	Nilai	39.99	61.45	-21.46	100%
5.	Perbedaan skor literasi	Nilai	3.39	3.39	0	100%
6.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	22.46	39.99	-17.53	100%
7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.87	77.59	-0.72	100%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.92	75.68	-1.76	100%
9.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.96	58.17	3.79	93,88%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	99	99	0	100%
11.	Indeks distribusi guru	%	1	0	1	100%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	1184	678	506	57,26%
13.	Proporsi PTK penggerak*	%	1184	13	1171	1,10%
	<b>SMP</b>					85,07%
1.	Angka partisipasi kasar	%	100	84,32	15,68	84,32%
2.	Angka partisipasi sekolah	%	100	84,32	15,68	84,32%
3.	Kemampuan literasi	Nilai	70.05	71.03	-0,98	100%
4.	Kemampuan numerasi	Nilai	68.77	63,81	4,96	92,79%
5.	Perbedaan skor literasi	Nilai	3.14	3.14	0	100%
6.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	9.78	9,78	0	100%
7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	74.64	70,25	4,39	94,12%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.44	74,59	-2,15	100%
9.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62	56,85	5,15	91,69%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	96	96	0	100%
11.	Indeks distribusi guru	%	1	0	1	100%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	423	235	188	55,56%
13.	Proporsi PTK penggerak*	%	423	13	410	3,07%



3	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	146	146	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>17,50%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	18,71	81,29	18,71%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	18,71	81,29	18,71%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	100%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0	100%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0	100%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%		0	0	100%

**Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan  
untuk Anggaran yaitu :**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp. 200.000.000	0	0
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 292.097.260	Rp. 201.001.299	68,81%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Rp. 28.179.080	0	0

	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 124.702.550	Rp. 56.954.300	45,67%
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Rp. 139.552.800	Rp. 109.462.800	78,44%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp. 9.764.349.858	Rp. 25.000.000	0,26%
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dan BOS Sekolah Dasar	Rp. 345.658.100	Rp. 150.438.000	43,52%
	Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp. 51.061.715	Rp. 47.489.900	93,00
	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Rp. 80.348.680	Rp. 71.811.900	89,38%
	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang Pendidikan	Rp. 80.572.280	Rp. 72.574.750	90,07%
	Koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 30.275.000	0	0
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Rp. 69.477.550	Rp. 65.989.000	94,98%
	Fasilitasi komunikasi belajar Pendidikan dan tenaga kependidikan	Rp. 48.539.765	Rp. 38.231.900	78,76%
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi	Rp. 49.999.650	Rp. 30.175.000	60,35%
	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Rp. 196.142.600	Rp. 191.733.200	97,75%
	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Rp. 6.387.875.671	Rp. 5.244.139.213	82,10%
	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan	Rp. 145.839.630	Rp. 113.896.300	78,10%
	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Rp. 191.737.100	Rp. 169.613.350	88,46%
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rp. 4.663.949.316	Rp. 3.816.842.531	81,84%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 4.204.014.000	Rp. 3.977.039.320	94,60%
	Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, prasarana utilitas sekolah	Rp. 3.402.411.740	Rp. 2.756.743.517	81,02%

		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 444.520.330	Rp. 324.293.050	72,95%
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP	Rp. 25.147.750	Rp. 18.251.850	72,58%
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP	Rp. 76.120.750	Rp. 51.864.450	68,13%
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Rp. 92.592.000	Rp. 90.060.000	97,27%
		Pengelolaan dana BOS SMP	Rp. 5.259.330.000	Rp. 25.000.000	0,48%
		Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp. 27.067.050	Rp. 23.309.250	86,12%
		Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Rp. 27.067.050	Rp. 24.974.800	91,90%
		Pelatihan penggunaan aplikasi bidang Pendidikan	Rp. 26.927.050	Rp. 23.782.050	88,32%
		Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 29.999.950	Rp. 21.489.950	71,63%
		Fasilitasi komunikasi belajar Pendidikan dan tenaga kependidikan	Rp. 199.384.445	Rp. 179.284.400	89,92%
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi	Rp. 44.061.500	Rp. 40.824.000	92,65%
		Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Rp. 221.015.475	Rp. 205.392.000	92,93%
		Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan	Rp. 20.984.820	Rp. 19.539.800	93,11%
		Pengadaan perlengkapan peserta didik	Rp. 131.999.850	Rp. 129.825.000	98,35%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp. 1.075.400.455	Rp. 1.020.969.200	94,94%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp. 618.237.000	Rp. 615.559.265	99,57%
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp. 141.953.955	Rp. 90.210.195	63,55%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 9.999.900	0	0
		Pengelolaan Dana	Rp.	Rp. 19.999.810	1,00%

		BOP PAUD	2.004.799.810		
		Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp. 101.143.785	Rp. 64.201.450	63,48%
		Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Rp. 46.144.200	Rp. 36.700.900	79,54%
		Pelatihan penggunaan aplikasi bidang Pendidikan	Rp. 49.390.150	Rp. 39.898.150	80,78%
		Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 26.373.100	0	0
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Rp. 52.641.260	Rp. 39.402.410	74,85%
		Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan	Rp. 61.322.160	Rp. 28.473.700	46,43%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	Rp. 789.400.000	0	0
		Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan	Rp. 13.003.000	0	0
Proram pendidikan dan tenaga kependidikan			Rp. 63.396.100	0	0
Program pengendalian perijinan pendidikan			Rp. 12.829.900	0	0
	<b>Total</b>		<b>Rp. 42.189.036.900</b>	<b>Rp. 20.272.341.960</b>	<b>48,14%</b>

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk Bidang Urusan Pendidikan yaitu :

No	Alokasi Anggaran		
	APBD	APBN	Lainnya
	Rp. 42.189.036.900,-		

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Bidang Urusan Pendidikan yaitu :

No	Kualifikasi	Jumlah
1	<b>Golongan Gol IV</b>	<b>7</b>

	Gol III	14
	Gol II	2
2	<b>Eselon</b>	
	Eselon II	1
	Eselon III	1
	Eselon IV	11
3	<b>Pendidikan</b>	
	S2	9
	S1	10
	Diploma	1
	SLTA	3
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
  - Belum maksimalnya pelaporan SPM karena kurangnya pemahaman dalam penginputan laporan SPM
  - Belum maksimalnya pelaksanaan penerapan SPM karena kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan SPM
- Solusi
  - Dalam pelaporan dan penginputan SPM tetap dilaporkan
  - Pelaksanaan SPM tetap dilakukan

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Barito Timur secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

#### **No Jenis Pelayanan Dasar**

- 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4 Pelayanan Kesehatan Balita
- 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 8 Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
- 9 Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
- 10 Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11 Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- 12 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

### 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	2.201		2.201	100%
	<i>Persentase Pencapaian</i>					<b>20,00%</b>

	<i>Mutu Pelayanan (20%)</i>	<i>Minimal Dasar</i>				
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	1.902		1.902	100%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	252.842		252.842	100%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	1.776		1.776	100%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	1.916		1.916	100%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	1.655		1.655	100%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	1.520		1.520	100%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	5.333		5.333	100%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1.757		1.757	100%
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.222		2.222	100%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1.555		1.555	100%
	11. Gel USG	Botol	364		364	100%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	624		624	100%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	781		781	100%
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.063		2.063	100%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	287		287	100%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	267		267	100%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	2.469		2.469	100%

2	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2.101		2.101	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Formulir partograf	Formulir	2100		2100	100%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2100		2100	100%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2100		2100	100%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1145		1145	100%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	484		484	100%
	6. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Paket	1.683		1.683	100%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	677		677	100%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	277		277	100%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	257		257	100%
3	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2.001		2.001	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	1862		1862	100%



	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	2007		2007	100%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	2007		2007	100%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	2007		2007	100%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	0		0	0
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2007		2007	100%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1600		1600	100%
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	587		587	100%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1590		1590	100%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	789		789	100%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	160		160	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	97		97	100%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	132		132	100%
	14. Kader Kesehatan	Orang	65		65	100%
4	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		10.794		10.794	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	8921		8921	100%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	9591		9591	100%

	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	9133		9133	100%
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	2111		2111	100%
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	14.975		14.975	100%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1646		1646	100%
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	2757		2757	100%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2040		2040	100%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2591		2591	100%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2230		2230	100%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin	2007		2007	100%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1983		1983	100%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	14829		14829	100%
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	3630		3630	100%
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	3568		3568	100%
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	1948		1948	100%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2623		2623	100%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2674		2674	100%
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	1934		1934	100%
	20 . Guru PAUD	Orang	63		63	100%
	21 . Kader Kesehatan	Orang	469		469	100%
5	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		12054		12054	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>

	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	10042		10042	100%
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	9309		9309	100%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	9672		9672	100%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	8819		8819	100%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	8808		8808	100%
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	42976		42976	100%
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	246		246	100%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	6421		6421	100%
	9. Media promosi kesehatan	Paket	5596		5596	100%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	4635		4635	100%
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	1680		1680	100%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1992		1992	100%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1847		1847	100%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	1614		1614	100%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	965		965	100%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	955		955	100%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	661		661	100%

	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	274		274	100%
6	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		12054		12054	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25855		25855	100%
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	279		279	100%
	3. Alat : Tensimeter	Unit	184		184	100%
	4. Alat : Glukometer	Unit	151		151	100%
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	258		258	100%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	100386		100386	100%
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	31387		31387	100%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	185		185	100%
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	206		206	100%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	40503		40503	100%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	26152		26152	100%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	20695		20695	100%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	40071		40071	100%
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	36252		36252	100%

	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	20155		20155	100%
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	5038		5038	100%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	1804		1804	100%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2017		2017	100%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	76		76	100%
7	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		15266		15266	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	4845		4845	100%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	2668		2668	100%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	3098		3098	100%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	18132		18132	100%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	9529		9529	100%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	9920		9920	100%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5561		5561	100%

	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	1161		1161	100%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	946		946	100%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1444		1444	100%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	108		108	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	108		108	100%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	68		68	100%
8	<b>Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		21714		21714	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	7837		7837	100%
	2. Obat Hipertensi	Paket	56395		56395	100%
	3. Tensimeter	Unit	237		237	100%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	13058		13058	100%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12572		12572	100%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	1460		1460	100%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	910		910	100%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1355		1355	100%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	108		108	100%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi	Orang	140		140	100%

	kesehatan dan ilmu perilaku					
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	324		324	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	120		120	100%
9	<b>Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		1191		1191	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	12215		12215	100%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	852		852	100%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	4395		4395	100%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	804		804	100%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	640		640	100%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	364		364	100%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	849		849	100%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1140		1140	100%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	239		239	100%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	121		121	100%

	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	119		119	100%
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	246		246	100%
10	<b>Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		198		198	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	38		38	100%
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	79		79	100%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	1049		1049	100%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	337		337	100%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	195		195	100%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	268		268	100%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	86		86	100%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	41		41	100%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	0		0	0
11	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis</b>					



	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		1469		1469	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Media promosi Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1211		1211	100%
	2. Reagen Zn TB	Kit	829		829	100%
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	2147		2147	100%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2326		2326	100%
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	843		843	100%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	965		965	100%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	549		549	100%
	8. Tuberulin	Vial	717		717	100%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	268		268	100%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1107		1107	100%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	176		176	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	120		120	100%
	13. Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	438		438	100%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	3		3	100%
	15. Kader Kesehatan	Orang	65		65	100%
12	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan resiko</b>					

	<b>terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2873		2873	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1519		1519	100%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	2427		2427	100%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	2448		2448	100%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	2712		2712	100%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	599		599	100%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	903		903	100%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	841		841	100%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	585		585	100%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	121		121	100%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	4		4	100%

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 877.726.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 113.306.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 109.956.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 1.471.890.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 490.046.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 606.983.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 187.533.850
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 105.769.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 86.858.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 40.953.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 104.306.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 35.925.000
	Total		<b>Rp. 4.381.626.020</b>

#### 4.2.3 Realisasi

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan yaitu:

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>61,61%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	2.201	1695	506	77,01%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>15,73%</b>

	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	78,63%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	1.902	1406	496	73,63%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	252.842	179711	73131	71,08%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	1.776	1388	388	78,15%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	1.916	1504	412	78,50%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	1.655	1202	453	72,63%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	1.520	1124	396	73,95%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	5.333	4213	1120	79,00%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1.757	1359	398	77,35%
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.222	1769	453	79,61%
	10. Media promosi Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1.555	1119	436	71,96%
	11. Gel USG	Botol	364	177	187	48,63%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	624	569	55	91,19%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	781	776	5	99,36%
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.063	1847	216	89,53%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	287	285	2	99,30%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	267	253	14	94,76%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	2.469	1427	1042	57,80%
2	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>					

	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>64,24%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2.101	1687	414	80,30%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>16,08%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	80,42%
	1. Formulir partograf	Formulir	2100	1701	399	81,00%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2100	1711	389	81,48%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2100	1711	389	81,48%
	4. Media promosi Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1145	760	385	66,38%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	484	436	48	90,08%
	6. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Paket	1.683	1395	288	82,89%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	677	672	5	99,26%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	277	210	67	75,81%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	257	168	89	65,37%
3	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>65,09%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2.001	1628	373	81,36%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>16,51%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	82,53%
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	1862	1557	305	83,62%
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	2007	1691	316	84,26%

	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	2007	1700	307	84,70%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	2007	1700	307	84,70%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	0	0	0	0
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2007	1700	307	84,70%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1600	1197	403	74,81%
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	587	545	42	92,84%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1590	1405	185	88,36%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	789	785	4	99,49%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	160	156	4	97,50%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	97	89	8	91,75%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	132	117	15	88,64%
	14. Kader Kesehatan	Orang	65	69	-4	100%
4	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>69,02%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		10.794	9312	1482	86,27%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>17,54%</b>
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	87,68%
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	8921	7852	1069	88,02%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	9591	8550	1041	89,15%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	9133	8050	1083	88,14%

	4. Vitamin A Biru	Kapsul	2111	2108	3	99,86%
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	14.975	13968	1007	93,28%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1646	1357	289	82,44%
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	2757	2554	203	92,64%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2040	1930	110	94,61%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2591	2136	455	82,44%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2230	1936	294	86,82%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin	2007	1337	670	66,62%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1983	1435	548	72,37%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	14829	12312	2517	83,03%
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	3630	3108	522	85,62%
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	3568	3039	526	85,17%
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	1948	1886	62	96,82%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2623	2484	139	94,70%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2674	2529	145	94,58%
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	1934	1818	116	94,00%
	20 . Guru PAUD	Orang	63	47	16	74,60%
	21 . Kader Kesehatan	Orang	469	452	17	96,38%
5	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>61,74%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		12054	9303	2751	77,18%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>16,17%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	80,85

	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	10042	7437	2605	74,06%
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	9309	7072	2237	75,97%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	9672	7222	2450	74,67%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	8819	6528	2291	74,02%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	8808	6727	2081	76,37%
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	42976	15974	27002	37,17%
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	246	221	25	89,84%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	6421	4497	1924	70,04%
	9. Media promosi kesehatan	Paket	5596	4073	1523	72,78%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	4635	3756	879	81,04%
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	1680	1514	166	90,12%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1992	1836	156	92,17%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1847	1701	146	92,10%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	1614	1456	158	90,21%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	965	838	127	86,84%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	955	820	135	85,86%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	661	652	9	98,64%



	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	274	256	18	93,43%
6	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>56,78%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		12054	61388	25100	70,38%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>14,17%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	70,85%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25855	12951	12904	50,09%
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	279	162	117	58,06%
	3. Alat : Tensimeter	Unit	184	175	9	95,11%
	4. Alat : Glukometer	Unit	151	136	15	90,07%
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	258	236	22	91,47%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	100386	78654	21732	78,35%
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	31387	13865	17522	44,17%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	185	165	20	89,19%
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	206	206	0	100%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	40503	27458	13045	67,79%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	26152	13139	13013	50,24%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	20695	20563	132	99,36%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	40071	27067	13004	67,55%
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	36252	15299	20953	42,20%
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	20155	10298	9857	51,09%

	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	5038	1707	3331	33,88%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	1804	957	847	53,05%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2017	1836	181	91,03%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	76	71	5	93,42%
7	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>60,40%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		15266	11526	3740	75,50%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>16,53%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	82,63%
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	4845	4826	19	99,61%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	2668	2783	-115	100%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	3098	3216	-118	100%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	18132	7492	10640	41,32%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	9529	7244	2285	76,02%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	9920	6736	3184	67,90%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5561	3979	1582	71,55%
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	1161	530	631	45,65%

	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	946	904	42	95,56%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1444	1278	166	88,50%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	108	113	-5	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	108	103	5	95,37%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	68	63	5	92,65%
8	<b>Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>78,56%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		21714	21323	391	98,20%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>18,73%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	93,67%
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	7837	7937	-100	100%
	2. Obat Hipertensi	Paket	56395	47617	8778	84,43%
	3. Tensimeter	Unit	237	243	-6	100%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	13058	13191	-133	100%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12572	12737	-165	100%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	1460	763	697	52,26%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	910	917	-7	100%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1355	1461	-106	100%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	108	103	5	95,37%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	140	135	5	96,43%

	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	324	323	1	99,69%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	120	115	5	95,83%
9	<b>Pelayanan Kesehatan penderit Diabetes Melitus</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		1191	1256	-65	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>16,69%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	83,44%
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	12215	7514	4701	61,51%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	852	969	-117	100%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	4395	1616	2779	36,77%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	804	927	-123	100%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	640	670	-30	100%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	364	336	28	92,31%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	849	726	123	85,51%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1140	965	175	84,65%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	239	195	44	81,59%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	121	109	12	90,08%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	119	96	23	80,67%

	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	246	217	29	88,21%
10	<b>Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		198	225	-27	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>13,12%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	65,60%
	1. Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	38	29	9	76,32%
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	79	89	-10	100%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	1049	311	738	29,65%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	337	327	10	97,03%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	195	193	2	98,97%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	268	131	137	48,88%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	86	55	31	63,95%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	41	31	10	75,61%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0	0
11	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis</b>					

	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		1469	1771	-302	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>18,76%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	<b>93,78%</b>
	1. Media promosi Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1211	1366	-55	100%
	2. Reagen Zn TB	Kit	829	981	-152	100%
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	2147	2403	-256	100%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2326	2445	-119	100%
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	843	819	24	97,15%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	965	1118	-153	100%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	549	703	-159	100%
	8. Tuberkulin	Vial	717	761	-44	100%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	268	224	44	83,58%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1107	1106	1	99,91%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	176	179	-3	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	120	115	5	100%
	13. Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	438	439	-1	100%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	3	1	2	100%
	15. Kader Kesehatan	Orang	65	63	2	96,92%
12	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan resiko</b>					

	<b>terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>61,84%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2873	2221	652	77,31%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>15,72%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	78,58%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1519	1063	456	69,98%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	2427	1916	511	78,95%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	2448	1954	494	79,82%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	2712	2162	550	79,72%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	599	574	24	95,83%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	903	858	45	95,02%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	841	828	13	98,45%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	585	544	41	92,99%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	121	115	6	95,04%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	4	0	4	0%

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan  
untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 350.195.260	Rp. 346.944.260	99,07%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 461.366.920	Rp. 417.459.072	90,48%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 387.627.930	Rp. 244.562.885	63,09%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 776.321.715	Rp. 682.519.009	87,92%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 289.152.455	Rp. 246.770.020	85,34%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 206.884.930	Rp. 180.516.730	87,25%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 156.838.505	Rp. 72.519.400	46,24%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 474.114.890	Rp. 454.158.398	95,79%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 457.233.110	Rp. 453.866.178	99,26
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 436.874.055	Rp. 433.908.096	99,32%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 254.891.105	Rp. 243.032.900	95,35%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 130.125.145	Rp. 128.217.331	98,53%
	Total		<b>Rp. 4.381.626.020</b>	<b>Rp. 3.904.474.279</b>	<b>89,11%</b>



#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk Bidang Urusan Kesehatan yaitu :

No	Alokasi Anggaran		
	APBD	APBN	Lainnya
	Rp. 4.381.626.020,-		

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Bidang Urusan Kesehatan yaitu :

No	Kualifikasi	Jumlah
1	<b>Golongan</b>	
	Gol IV	7
	Gol III	26
	Gol II	1
2	<b>Eselon</b>	
	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	26
	Pelaksana	3
3	<b>Pendidikan</b>	
	S3	-
	S2	13
	S1	21
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
  - Puskesmas selalu lambat mengisi data pencapaian diaplikasi khusus SPM yg sudah disediakan oleh dinas kesehatan
- Solusi
  - Dinas Kesehatan selalu menghubungi pihak Puskesmas agar segera mengisi data pencapaian SPM

## 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Barito Timur secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

#### No Jenis Pelayanan Dasar

- 1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

### 4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	122610.60		122610.60	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	Jaringan Perpipaan					
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari)	Rumah Tangga	30231		30231	100%

	sama dengan 4 galon melalui SPAM					
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	30231		30231	100%
	Bukan Jaringan Perpipaan					
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	30231		30231	100%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	30231		30231	100%
2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>

	Jumlah yang harus dilayani		122784		122784	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	5959		5959	100%
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	2532		2532	100%
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	24022		24022	100%

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rp. 3.828.592.202
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rp. 2.539.800.289
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 6.368.392.491</b>

#### 4.3.3 Realisasi

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>19,72%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	122610.60	30231	92379,6	24,66%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					12,01 %
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM Jaringan Perpipaan		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	60,06%
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama	Rumah Tangga	30231	30231	0	100%

	dengan 4 galon melalui SPAM					
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga	30231	5069	25162	16,77%
	Bukan Jaringan Perpipaan					
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	30231	30231	0	100%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga	30231	7099	23132	23,48%
2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>

	Jumlah yang harus dilayani		122784	122784	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>14,44%</b>
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	72,20%
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	5959	5959	0	100%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	2532	420	2112	16,59%
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai	Rumah Tangga	24022	24022	0	100%

	standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					
--	--	--	--	--	--	--

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rp. 3.828.592.202	Rp. 2.885.279.821	75,36%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rp. 2.539.800.289	Rp. 2.401.980.931	94,57%
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 6.368.392.491</b>	<b>Rp. 5.287.260.752</b>	<b>83,02%</b>

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk Bidang Urusan Pekerjaan Umum yaitu :

No	Alokasi Anggaran		
	APBD	APBN	Lainnya
	Rp. 6.368.392.491,-		

#### 4.3.5 Dukungan personil

Dukungan Personil Bidang Urusan Pekerjaan Umum yaitu :

No	Kualifikasi	Jumlah
1	<b>Golongan</b>	
	Gol IV	8
	Gol III	45
	Gol II	7
	Gol I	1
2	<b>Eselon</b>	
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	12



	Pelaksana	42
3	<b>Pendidikan</b>	
	S3	-
	S2	13
	S1	34
	Diploma	3
	SLTA	9
	SLTP	1
	SD	1
	<b>Jumlah</b>	61

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
  - Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pengumpulan data, terdapat indicator yang kosong pada penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic karena Kabupaten/Kota tidak memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
  - Untuk kegiatan fisik masih dalam tahap perencanaan sehingga belum dilaksanakan
- Solusi
  - Menggunakan SDM yang ada dalam hal pengumpulan data
  - Menunggu pelaksanaan fisik

## 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Barito Timur secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

#### No Jenis Pelayanan Dasar

- 1 Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota
- 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota

### 4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Penyediaan &amp; rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0		0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	rumah	0		0	0%
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	rumah	0		0	0%
	3. Pembangunan Kembali rumah bencana	rumah	0		0	0%

	4. Pembangunan baru dilokasi baru/relokasi bagi korban bencana	rumah	0		0	0%
2	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kotas</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0		0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	
	1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	Rumah	0		0	0%
	2. Subsidi uang sewa	Rumah	0		0	0%
	3. Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0		0	0%

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Pengembangan Permukiman	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Rp. 65.821.480
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 65.821.480</b>

#### 4.4.3 Realisasi

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan

Rakyat yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Penyediaan &amp; rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>0%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0	0	0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>0%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	0%
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	rumah	0	0	0	0%
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	rumah	0	0	0	0%
	3. Pembangunan Kembali rumah bencana	rumah	0	0	0	0%
	4. Pembangunan baru dilokasi baru/relokasi bagi korban bencana	rumah	0	0	0	0%
2	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kotas</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>0%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0	0	0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>0%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	0%
	1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	Rumah	0	0	0	0%

	2. Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0%
	3. Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	0%

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Permukiman	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Rp. 65.821.480	Rp. 46.168.500	70,14%
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 65.821.480</b>	<b>Rp. 46.168.500</b>	<b>70,14%</b>

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

No	Alokasi Anggaran		
	APBD	APBN	Lainnya
	Rp. 65.821.480,-		

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

No	Kualifikasi	Jumlah
1	<b>Golongan</b>	
	Gol IV	1
	Gol III	3
2	<b>Eselon</b>	
	Eselon II	
	Eselon III	1
	Eselon IV	1
	Pelaksana	2
3	<b>Pendidikan</b>	
	S2	2
	S1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
  - Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam proses pengumpulan data, indikator yang tidak terisi tidak dilaksanakan di daerah serta tidak ada relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota
  - untuk Tahun 2024 masih menunggu Laporan Pasca Bencana dari BPBDDAMKAR kabupaten Barito Timur jika terjadi bencana di Kabupaten Barito Timur
  - Belum ada SK Kawasan Rawan Bencana yang ditetapkan Kepala Daerah
- Solusi
  - Menggunakan SDM yang ada dalam hal pengumpulan data
  - Tetap siap siaga jika terjadi bencana

## 4.5 Urusan Trantibumlinmas

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

#### No Jenis Pelayanan Dasar

- 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2 Pelayanan informasi rawan bencana
- 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

### 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	113229		113229	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	Jaringan Perpipaan					
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit				100%

	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*	Dokumen				100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang				100%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen				100%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	Orang				
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang				
1	<b>Pelayanan informasi rawan bencana</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		66		66	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1		1	100%



	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	66		66	100%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	25		25	100%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	4		4	100%
2	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0		0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	27		27	100%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	2		2	100%
3	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0		0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	0		0	0
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	0		0	0
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	0		0	0
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0		0	0

	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	0		0	0
1	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0		0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	22		22	100%
	2. Prosedur operasional penanganan penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		1		1	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	1		1	100%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	1		1	100%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	22		22	100%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	22		22	100%

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 106.902.850

Umum (Trantibum)	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35.304.305
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 582.365.600
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 179.951.700
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 241.810.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 136.418.380
	<b>Total</b>		<b>Rp. 1.282.752.835</b>
Program Penanggulangan Bencana (Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 54.800.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 58.803.300
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 32.935.450
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 32.467.700
		Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Rp. 46.640.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 37.500.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Rp. 91.375.830
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rp. 22.558.950
	<b>Total</b>		<b>Rp. 377.081.230</b>

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.000.000
		Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 164.153.016
		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Rp. 150.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp. 31.563.800
		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadaman kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Rp. 150.000.000
	Total		<b>Rp. 560.716.816,-</b>

#### 4.5.3 Realisasi

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>79,91%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	113229	113100	129	99,89%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>9,97%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	49,85
	Jaringan Perpipaan					
	1 Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	1120	1110	10	49,85%

	2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*	Dokumen	1	1	0	100%
	3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	3	3	0	100%
	4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0%
	5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	0%
	6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	0%
1	<b>Pelayanan informasi rawan bencana</b>						
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>0,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani			0	0	0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>						<b>0,00%</b>

	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	0%
	1 Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	0	0	0	0%
	2 Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	0	0	0	0%
	3 Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	0	0	0	0%
	4 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	0	0	0	0%
2	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		66	66	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1 Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	27	27	0	100%
	2 Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	2	2	0	100%
3	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>0%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0	0	0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>0%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	0%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	0		0	0
	2. Pendataan terhadap warga yang	Orang	0		0	0

	terkena/menjadi korban bencana					
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	0		0	0%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0		0	0
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	0		0	0
1	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		22	22	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>3,33%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	16,67%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	0	0	0	0%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		0	0	0	0%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	5	5	0	100%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	0	0	0	0%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	0	0	0	0%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	0	0	0	0%

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk Anggaran yaitu:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 106.902.850	Rp. 106.902.850	100%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35.304.305	Rp. 35.304.305	100%
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 582.365.600	Rp. 582.365.000	100%
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 179.951.700	Rp. 179.951.700	100%
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 241.810.000	Rp. 241.810.000	100%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 136.418.380	Rp. 136.418.380	100%
	<b>Total</b>		<b>Rp. 1.282.752.835</b>	<b>Rp. 1.282.752.235</b>	<b>100%</b>
Program Penanggulangan Bencana (Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 54.800.000	Rp. 46.403.500	84,68%



	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 58.803.300	Rp. 55.403.500	94,22%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 32.935.450	Rp. 30.275.000	61,56%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 32.467.700	Rp. 9.990.000	30,77%
		Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Rp. 46.640.000	Rp. 12.950.000	27,77%
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 37.500.000	Rp. 2.500.000	6,67%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Rp. 91.375.830	Rp. 77.743.100	85,08%
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rp. 22.558.950	Rp. 20.126.075	89,22
	<b>Total</b>		<b>Rp. 377.081.230</b>	<b>Rp. 245.291.975</b>	<b>65,08%</b>
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.000.000	Rp. 56.650.000	87,15%
		Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 164.153.016	Rp. 144.470.100	88,01%
		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Rp. 150.000.000	Rp. 149.894.200	99,93%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp. 31.563.800	Rp. 28.324.900	89,74%
		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadaman	Rp. 150.000.000	Rp. 149.800.000	99,87%

		kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana			
	Total		<b>Rp. 560.716.816,-</b>	<b>Rp. 529.139.200</b>	<b>94,37%</b>

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu :

No	Alokasi Anggaran		
	APBD	APBN	Lainnya
	Rp. 1.282.752.835,-(SatpolPP)		
	Rp. 377.081.230,-(Bencana)		
	Rp. 560.716.816,-(Damkar)		

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu :

No	Kualifikasi	Jumlah
1	<b>Golongan</b>	
	Gol IV	1
	Gol III	3
2	<b>Eselon</b>	
	Eselon III	2
	Eselon IV	2
	Pelaksana (PHL)	1
3	<b>Pendidikan</b>	
	S1	4
	Jumlah (SatpolPP)	<b>5</b>

No	Kualifikasi	Jumlah
1	<b>Golongan</b>	
	Gol IV	5
	Gol III	2
2	<b>Eselon</b>	
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	1

---

3	<b>Pendidikan</b>	
	S2	6
	S1	1
	Jumlah (BPBD)	<b>7</b>

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
  - Minimnya sarana dan prasarana yang ada pada SatpolPP, sehingga data yang dikumpulkan masih kurang dan tidak maksimal
  - Perhitungan kebutuhan yang didata kurang, karena keterbatasan anggaran
  - Perencanaan mengenai Anggaran selalu di optimalkan akan tetapi dalam Penganggaran yang sangat kurang sehingga serapan anggaran yang diperoleh minim.
  - Pelaksanaan yang terkendala anggaran
- Solusi
  - Menggunakan sarana dan prasarana yang ada.
  - Perhitungan tetap dilaksanakan walaupun dengan anggaran yang terbatas
  - Perencanaan mengenai anggaran sudah optimal dengan serapan anggaran yang minim
  - Dilaksanakan dengan seadanya

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Sosial di Kabupaten Barito Timur secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

#### No Jenis Pelayanan Dasar

- 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota

### 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial yaitu :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	40		40	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	40		40	100%

	2. Penyediaan permakanaan	Orang	0		0	0
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	14		14	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	0		0	0
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	26		26	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0		0	0
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	14		14	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	14		14	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0		0	0
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	14		14	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0		0	0
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5		5	100%
	13. Layanan rujukan	Orang	14		14	100%
2	<b>Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		6		6	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	6		6	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0		0	0
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	0		0	0

	4. Penyediaan sandang	Orang	6		6	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0		0	0
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	6		6	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	6		6	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	6		6	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0		0	0
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0		0	0
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0		0	0
	12. Layanan rujukan	Orang	0		0	0
3	<b>Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		1		1	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1		1	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0		0	0
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	1		1	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	0		0	0
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	0		0	0
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0		0	0
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	0		0	0

	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar	Orang	0		0	0
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0		0	0
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0		0	0
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0		0	0
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0		0	0
	13. Layanan rujukan	Orang	0		0	0
4	<b>Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>0%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0		0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>0%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	0%
	1. Layanan data dan pengaduan		0		0	0%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		0		0	0%
	3. Penyediaan permakanaan		0		0	0%
	4. Penyediaan sandang		0		0	0%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		0		0	0%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		0		0	0%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis		0		0	0%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat		0		0	0%

	Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan					
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		0		0	0%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		0		0	0%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		0		0	0%
	12. Layanan rujukan		0		0	0%
5	<b>Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap &amp; paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2273		2273	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>20,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	100,00%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	2273		2273	100%
	2. Penyediaan sandang	Orang	0		0	0
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0		0	0
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0		0	0
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2273		2273	100%

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial untuk Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 32.598.700
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Rp. 11.901.300



		Pemberian layanan rujukan	Rp. 146.906.800
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp. 34.227.350
		Penyediaan Sandang	Rp. 3.000.000
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 6.349.400
	<b>Total</b>		<b>Rp. 234.983.550</b>

#### 4.6.3 Realisasi

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial yaitu:

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	<b>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani	orang	40	40	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>12,31%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	61,54%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	40	40	0	100%
	2. Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0	0
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	14	14	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	26	26	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	0
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	14	14	0	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	14	14	0	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk	Orang	0	0	0	0

	Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK					
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	14	14	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100%
	13. Layanan rujukan	Orang	14	14	0	100%
2	<b>Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		6	6	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>8,33%</b>
	Jumlah mutu barang/jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	41,67%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	6	6	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0	0
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	0	0	0	0
	4. Penyediaan sandang	Orang	6	6	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	0
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	6	6	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	6	6	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	6	6	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0
	10. Pemberian pelayanan penelusuran	Orang	0	0	0	0

	keluarga/Bukti keberadaan keluarga					
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0
	12. Layanan rujukan	Orang	0	0	0	0
3	<b>Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		1	1	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>3,08%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	15,38%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0	0
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0	0
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	0
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	0	0	0	0
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	0	0	0	0
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0
	13. Layanan rujukan	Orang	0	0	0	0
4	<b>Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya</b>					

	<b>gelandangan dan pengemis di luar panti</b>					
	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>0%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		0	0	0	0%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>0%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	0%
	1. Layanan data dan pengaduan		0	0	0	0%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		0	0	0	0%
	3. Penyediaan permakanan		0	0	0	0%
	4. Penyediaan sandang		0	0	0	0%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		0	0	0	0%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		0	0	0	0%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis		0	0	0	0%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		0	0	0	0%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		0	0	0	0%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		0	0	0	0%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		0	0	0	0%
	12. Layanan rujukan		0	0	0	0%
5	<b>Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap &amp; paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota</b>					

	<i>Persentase Pencapaian Penerima Layanan (80%)</i>		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	<b>80,00%</b>
	Jumlah yang harus dilayani		2273	2273	0	100%
	<i>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)</i>					<b>8,00%</b>
	Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM		Dipenuhi	Terpenuhi	Belum terpenuhi	40,00%
	1. Penyediaan permakanaan	Orang	2273	2273	0	100%
	2. Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0	0
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0	0
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2273	2273	0	100%

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial untuk  
Anggaran yaitu :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 32.598.700	Rp. 32.598.700	100%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Rp. 11.901.300	Rp. 10.381.300	87,23%
		Pemberian layanan rujukan	Rp. 146.906.800	Rp. 144.106.800	98,09%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp. 34.227.350	Rp. 34.227.350	100%
		Penyediaan Sandang	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100%
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 6.349.400	Rp. 6.349.400	100%
	<b>Total</b>		<b>Rp. 234.983.550</b>	<b>Rp. 230.663.550</b>	<b>98,16</b>

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk Bidang Urusan Sosial yaitu :

No	Alokasi Anggaran		
	APBD	APBN	Lainnya
	Rp. 234.983.550,-		

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Bidang Urusan Sosial yaitu :

No	Kualifikasi	Jumlah
1	<b>Golongan</b> Gol III	1
2	<b>Pendidikan</b> S1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
  - Sejauh ini pengumpulan data sudah berjalan dengan bagus, hanya saja keakuratan dan masih ada permasalahan di data kependudukan individu yang didata untuk SPM
  - Perhitungan masih banyak yang belum tercover, karena keterbatasan anggaran sehingga hanya indikator tertentu yang bisa direalisasikan
  - Perencanaan kegiatan sudah bisa dilakukan dengan baik, hanya dukungan anggaran yang masih kurang, sehingga SPM dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang seadanya
  - Pelaksanaan SPM sudah sesuai dengan perencanaan, hanya saja kualitasnya yang masih kurang
- Solusi
  - Tetap mengumpulkan data dan memakai data yang ada
  - Menggunakan anggaran yang tersedia dalam pagu
  - Dalam melaksanakan SPM menggunakan anggaran yang tersedia
  - Pelaksanaan SPM Tetap dilaksanakan

## 4.7 Program dan Kegiatan

### 4.7.1 Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program dan kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024

Program	Kegiatan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Total	Rp. 42.189.036.900

### 4.7.2 Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Program dan kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2024

Program	Kegiatan
program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Total	Rp. 4.381.626.020

#### 4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum  
Tahun 2024

Program	Kegiatan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL	Rp. 6.368.392.491

#### 4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat  
Tahun 2024

Program	Kegiatan
Program Pengembangan Permukiman	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
TOTAL	Rp. 65.821.480



#### 4.7.5 Urusan Trantibumlinmas

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Program dan kegiatan Urusan Trantibumlinmas  
Tahun 2024

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (SatpolPP)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Total	Rp. 1.282.752.835
Program Penanggulangan Bencana (Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Total	Rp. 377.081.230
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Total	Rp. 560.716.816,-

#### 4.7.6 Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Program dan kegiatan Urusan Sosial  
Tahun 2024

Program	Kegiatan
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Total	Rp. 234.983.550

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 oleh Bupati Barito Timur pada Tahun 2024 ini, memberi gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Timur sepanjang Tahun Anggaran 2024, yang dapat dirasakan oleh masyarakat sampai di pedesaan.

Sepanjang Tahun Anggaran 2024, banyak perubahan yang cukup signifikan dari segi pelayanan Pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya. Banyak permasalahan yang telah diatasi dan memberikan rasa puas bagi masyarakat dengan demikian dapat mensinergikan kekuatan untuk menggerakkan roda pemerintahan, oleh sebab itu substansi dari misi penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma pembangunan ke paradigma pelayanan dan pemberdayaan.

Sebagai konsekwensi perubahan paradigma tadi, saya selalu memberikan arahan dan memotivasi kepada semua jajaran satuan kerja pelaksana Pemerintah Kabupaten Barito Timur maupun pihak swasta serta kekuatan sosial lainnya untuk bersinergi dalam membangun Barito Timur menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi sesungguhnya berdampak sangat positif terhadap kegiatan pembangunan dan memotivasi keikutsertaan masyarakat dalam ikut berpartisipasi melalui proses perencanaan dan melaksanakan pembangunan daerah yang bernuansa pada aspek tatalaksana yang baik dan Good Governance serta akuntabilitas aparat.

Banyak hal yang sudah dicapai namun masih banyak harapan yang belum terealisasi. Keberhasilan yang dicapai bukanlah karena kemampuan saya selaku Bupati Barito Timur, tetapi merupakan dukungan dari semua komponen dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan masukan bagi semua pihak dalam rangka

pembinaan dan penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditahun-tahun berikutnya.